



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2024

(0721) 8010321

www.bkn.go.id

Jl. Let. Jend. Sutoyo No. 12

Jakarta Timur

PENGANTAR



Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) perlu menyusun

Rencana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Secara khusus di lingkungan Sekretariat Utama BKN, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020 - 2024, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Jakarta, Desember 2024
Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara

\$

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Maksud dan Tujuan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022	4
A. Visi dan Misi	4
B. Tujuan	4
C. Sasaran Strategis	5
D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	9
BAB III RENCANA KERJA 2024	40
BAB IV PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BKN Tahun 2022	9
Tabel 2.2 Realisasi IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2022	9
Tabel 2.3 Realisasi IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2022	10
Table 2.4 Hasil Penilaian Mandiri SPBE BKN Sumber: Data Diolah Tim SPBE BKN 2022	13
Tabel 2.5 Realisasi IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2022	15
Tabel 2.6 Laporan Hasil Evaluasi RB	16
Tabel 2.7 Realisasi IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2022	17
Tabel 2.8 Predikat Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi SAKIP	18
Tabel 2.9 Realisasi IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2022	19
Tabel 2.10 Realisasi IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2022	21
Tabel 2.12 Realisasi IKU 8. Nilai Predikat IKPA Tahun 2022	23
Tabel 2.13 Realisasi IKU 9. Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN di Media Online Tahun 2022	24
Tabel 2.14 Realisasi IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	25
Tabel 2.15 Realisasi IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	26
Tabel 2.16 Realisasi IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya Tahun 2022	27
Tabel 2.17 Realisasi IKU 13 Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan dan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan sesuai Roadmap RB per Tahun Tahun 2022	28
Tabel 2.18 Realisasi IKU 14. Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik Tahun 2022	31
Tabel 2.19 Realisasi IKU 15. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati Tahun 2022	31
Tabel 2.20 Realisasi IKU 16. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media	33
Tabel 2.21 Realisasi IKU 17. Indeks Profesional ASN Settama Tahun 2022	34
Tabel 2.22 Realisasi IKU 18. Persentase Pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Settama Tahun 2022	35
Tabel 2.23 Realisasi IKU 19. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit	36
Tabel 2.24 Tabel Komponen Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Unit Kerja	36
Tabel 2.25 Skor atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretaris Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022	37
Tabel 2.26 Realisasi IKU 21. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	38
Tabel 2.27 Realisasi IKU 22. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat Tahun 2022	40
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretaris Utama	44

Tabel 3. 2 Rencana Target IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2024	45
Tabel 3.3 Rencana Target IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2024	47
Tabel 3.4 Rencana Target IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2024	48
Tabel 3.5 Rencana Target IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2024	49
Tabel 3.6 Rencana Target IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2024	50
Tabel 3.7 Rencana Target IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2024	51
Tabel 3.8 Rencana Target IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2024	53
Tabel 3.9 Rencana Target IKU 8. Nilai Predikat IKPA Tahun 2024	54
Tabel 3.10 Formula dan Bobot Nilai IKPA	55
Tabel 3.11 Rencana Target IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN Tahun 2024	56
Tabel 3.12 Rencana Target IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	57
Tabel 3.13 Rencana Target IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama Tahun 2024	58
Tabel 3.14 Rencana Target IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi Tahun 2024	59
Tabel 3.15 Rencana Target IKU 13. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN	60
Tabel 3.16 Rencana Target IKU 14. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024	61
Tabel 3.17 Rencana Target IKU 15 Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2024	62
Tabel 3.18 Nilai Rencana Target IKU 16 Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI Tahun 2024	63
Tabel 3.19 Nilai Rencana Target IKU 17. Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat Tahun 2024	64
Tabel 3.20 Dasar Simulasi Perhitungan Target IKU	65
Tabel 3.21 Rencana Target IKU 18 Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati Tahun 2024	66
Tabel 3.22 Rencana Target IKU 19 Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya Tahun 2024	67
Tabel 3.23 Rencana Target IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN Tahun 2024	68
Tabel 3.24 Rencana Target IKU 21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	69
Tabel 3.25 Rencana Target IKU 22 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Settama Tahun 2024	70
Tabel 3.26 Rencana Target IKU 23 Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	71
Tabel 3.27 Rencana Target IKU 24 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2024	72
Tabel 3.28 Rencana Target IKU 25 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024	5
Gambar 2.2 Perjanjian Kerjasama dengan BSSN	12
Gambar 2.3 Sosialisasi Permenpan RB No 6 Tahun 2022 dan Aplikasi eKinerja tanggal 06 Juni 2022	12
Gambar 2.4 Sosialisasi Permenpan RB No 6 Tahun 2022 dan Aplikasi eKinerja tanggal 05 September 2022	13
Gambar 2.5 Komponen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2020 - 2021	18
Gambar 3.1 Peta Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020 - 2024	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan merupakan suatu dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah untuk periode satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Utama BKN Tahun 2024 bertujuan untuk menerjemahkan Rencana Strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit di bawah Kesekretariatan Utama. Dengan begitu, implementasi perencanaan strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BKN dapat lebih optimal dan terpantau dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama, dan target yang ingin dicapai di tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Sekretariat Utama dengan harapan seluruh kegiatan pada tahun 2024 dapat lebih terarah dan terukur.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
12. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

C. Ruang Lingkup

Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, koordinasi dan pemberian dukungan kepada seluruh unit organisasi BKN. Sekretariat Utama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan di BKN;
2. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan BKN;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BKN;
4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
5. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretaris Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh unit-unit organisasi dibawahnya yakni Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Umum dan Biro Hubungan Masyarakat, yang mana

rencana kerja ini disusun sebagai dasar dari pembagian target-target kerja tahun 2024 bagi unit-unit organisasi yang berada dibawah lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Utama Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran langkah-langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2024, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur serta diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama Tahun 2024.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022

A. Visi dan Misi

Rencana Kerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 yang dimana merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian Negara yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai Visi dan Misi serta Tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Visi Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara adalah melaksanakan Visi Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut : “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas, Sekretaris Utama BKN melaksanakan misi kelima BKN yaitu: “Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN” yang berfokus pada Sasaran Strategis ke 7 (tujuh) yakni “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dalam Indeks Profesionalitas ASN BKN, Indeks Maturitas SPBE BKN, Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN, Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dan Opini atas Laporan Keuangan BKN.

B. Tujuan

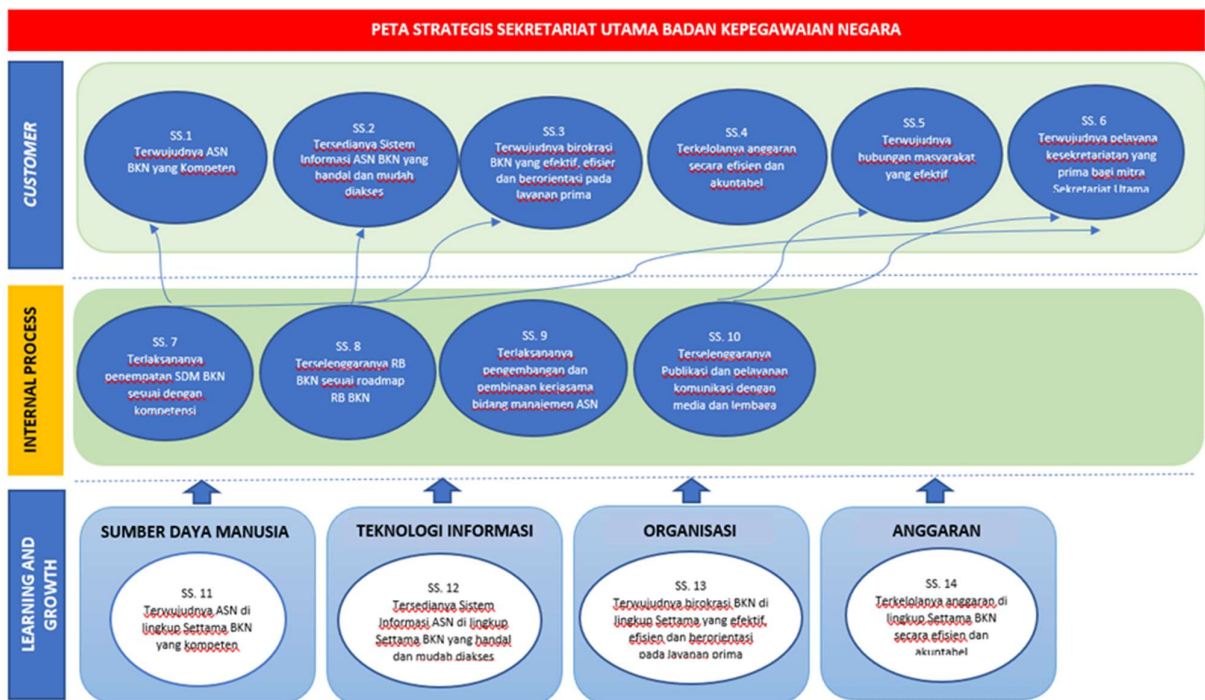
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan tujuan kelima Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan Visi & Misi Organisasi”

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara mencakup 4 (empat) dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara diantaranya: 1. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten; 2. Terwujudnya sistem informasi ASN yang handal dan mudah diakses; 3. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima; dan 4. Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel.

C. Sasaran Strategis

Sekretariat Utama BKN melaksanakan sasaran strategis ke-7 hingga 10 Badan Kepegawaian Negara seperti tersebut sebelumnya. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Utama BKN sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis Sekretaris Utama BKN dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022

1. *Customer Perspective* terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis (SS), sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
 - b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses;
 - c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
 - d. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel;
 - e. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif;
 - f. Sasaran Strategis 6: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
2. *Internal Process Perspective* merupakan proses yang harus dilakukan Sekretaris Utama untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan. Terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis 7: Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi;
 - b. Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN;
 - c. Sasaran Strategis 9: Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN;
 - d. Sasaran Strategis 10: Terselenggaranya Publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal;
3. *Learn and Growth Perspective* Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Sekretaris Utama BKN. Terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis 11: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten.
 - b. Sasaran Strategis 12: Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses;
 - c. Sasaran Strategis 13: Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima ;
 - d. Sasaran Strategis 14: Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

Dalam menilai pencapaian kelima belas Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2022 Sekretaris Utama menetapkan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing IKU nya memiliki target kerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Customer Perspective</i>				
1	Terwujudnya ASN BKN yang Kompeten	1	Indeks Profesional ASN BKN	80
2	Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses	2	Indeks Maturitas SPBE BKN	3,5
3	Terwujudnya Birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	3	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	82
		4	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	79
		5	Level Maturitas SPIP	4
		6	Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	370
4	Terkelolanya Anggaran Secara efisien dan akuntabel	7	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP
		8	Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	90
5	Terwujudnya hubungan Masyarakat yang efektif	9	Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN di Media Online	93
		10	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Menuju Informatif (81)

6	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretariat Utama	11	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	87
<i>Internal Process Perspective</i>				
7	Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi	12	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	92
8	Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN	13	Persentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap per tahun	100
		14	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik	91
9	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan Kerjasama bidang manajemen ASN	15	Persentase Dokumen Kerjasama yang disepakati	92
10	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	16	Persentase Jumlah Publikasi dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder lainnya	98,30
<i>Learn and Growth Perspective</i>				
11	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten	17	Indeks Profesional ASN Settama BKN	81
12	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses	18	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama	100

13	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	19	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN	36
		20	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara	85
14	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel	21	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	100
		22	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BKN Tahun 2022

D. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
77	77	80	80	82	70,42	78,42	76,18	95,22%

Tabel 2.2 Realisasi IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

IKU Indeks Profesional ASN BKN merupakan mandat untuk mewujudkan ASN yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024, dimana didalamnya tertuang mengenai perlunya pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di instansi pemerintahan. Sesuai dengan mandat tersebut, Sekretaris Utama BKN telah melakukan pengukuran dan perhitungan nilai Indeks Profesional di lingkungan BKN periode 2022 yang merupakan penilaian Indeks Profesional ASN atas Tahun 2021. Realisasi yang dicapai pada IKU Indeks Profesional ASN BKN pada Tahun 2022 adalah sebesar 76,18 dari target yang ditetapkan sebesar 80 (95,23%). Pengukuran dan perhitungan Indeks Profesional ASN BKN dilakukan sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 sesuai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Evaluasi Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 dengan nomor 353/NK.04.01/SD/A8/2022 pada tanggal 23 Desember 2022.

Pada Tahun 2022, pengukuran nilai Indeks Profesional ASN BKN mengambil data sepenuhnya melalui portal <https://ip-jasn.bkn.go.id/> dimana data tersebut bersumber dari aplikasi SAPK BKN dengan *cut off* pengambilan data per bulan Juli 2022. Nilai Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2021 tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2022 di seluruh unit kerja BKN Pusat, Kantor Regional dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

Berdasarkan data tarikan SAPK terkait nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN, diperoleh nilai sebesar 76,18 dengan rincian dimensi Kualifikasi sebesar 14,22 (nilai maksimal 25), Kompetensi sebesar 31,55 (nilai maksimal 40), Kinerja sebesar 25,57 (nilai maksimal 30) dan Disiplin sebesar 4,85 (nilai maksimal 5). Nilai Indeks Profesionalitas ASN ini termasuk dalam kategori “Sedang”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN tersebut menunjukkan indikasi PNS di lingkungan BKN pada umumnya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Terdapat beberapa catatan dari hasil pengukuran dan perhitungan nilai Indeks Profesional di lingkungan BKN pada Tahun 2022, diantaranya adalah pada dimensi Kualifikasi masih terdapat pegawai yang mempunyai kualifikasi Pendidikan setingkat SD, SMP, SMA dan D3 sehingga nilai rata-rata dimensi Kualifikasi di BKN masih tergolong rendah. Selain itu, pada penilaian dimensi Kualifikasi, masih belum memperhatikan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan. Untuk dimensi Kompetensi, nilai yang diperoleh BKN masih belum optimal karena terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan diklat sesuai dengan tingkat jabatannya dan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi teknis/pengembangan kompetensi 20 JP tiap Tahunnya. Sedangkan untuk dimensi Kinerja, pada pengukuran dan perhitungan nilai Indeks Profesional di lingkungan BKN yang dilakukan pada Tahun 2022, masih terdapat kendala dalam formulasi rumus nilai Kinerja Tahun 2021 pada perhitungan Indeks Profesional ASN BKN.

IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
3	3,2	3,5	3,7	4	78,42	2,29	2,92	73%

Tabel 2.3 Realisasi IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Indikator ini menggambarkan maturitas BKN dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan

kepada Pengguna SPBE. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE mengatur metode penilaian serta proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka pemantauan dan evaluasi SPBE mengalami perubahan regulasi yang semula diatur dalam PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2018, kemudian diubah menjadi PermenPANRB No. 59 Tahun 2020.

Dalam hal ini perhitungan perolehan realisasi untuk Indikator Utama Indeks Maturitas SPBE BKN ini didapatkan dari Nilai yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB dengan menggunakan formula perhitungan yang terdapat pada PermenPAN-RB No. 59 Tahun 2020. Pada tahun 2022 ini BKN menargetkan nilai Indeks Maturitas SPBE BKN sebesar 3,5 namun realisasi nilai yang diperoleh BKN pada tahun ini sebesar 2,92 dengan kategori “BAIK” atau dengan capaian kinerja 83,42% dari yang ditargetkan. Meskipun capaian kinerja BKN untuk indikator ini tidak mencapai 100% namun nilai yang diperoleh BKN berada di atas nilai rata rata Indeks Maturitas SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang hanya sebesar 2,77 dan nilai nasional 2,24.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan BKN dalam implementasi SPBE diantaranya: pada tahun 2022 BKN telah melaksanakan perbaikan Penjelasan mengenai rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang telah dilakukan dapat dilihat pada matriks berikut:

BKN juga sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka implementasi SPBE yang menjadi penyebab peningkatan nilai SPBE pada tahun 2022. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya:

a. Evaluasi atas Kebijakan Manajemen Keamanan

Sebagai evaluasi atas kebijakan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 sudah ditetapkan kebijakan baru mengenai Manajemen keamanan informasi. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 161.8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Tata Kelola Keamanan Informasi. Di dalam kebijakan tersebut sudah mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

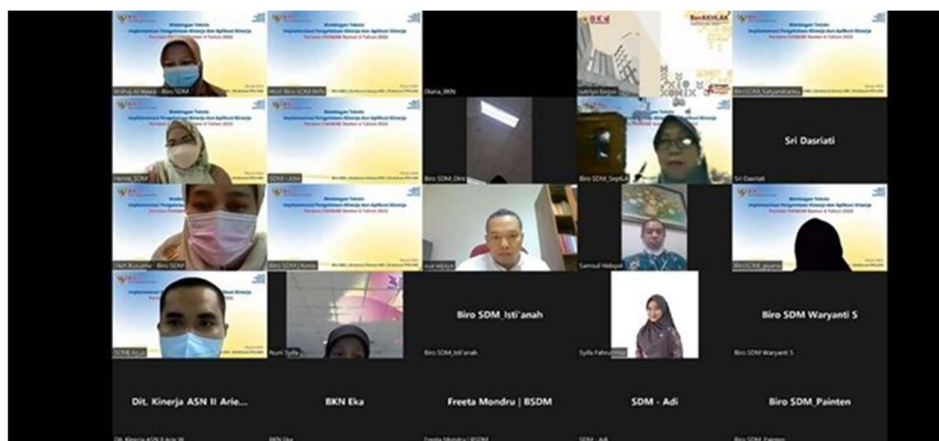
b. Pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

ditandai dengan adanya beberapa perjanjian kerja sama atas pertukaran data BKN dengan BSSN, Menpan, LAN, dan BRIN. Seluruh PKS ini sudah dimuat dalam website BKN.



Gambar 2.2 Perjanjian Kerjasama dengan BSSN
 Sumber : LKJ Settama BKN Tahun 2023

- c. Pembangunan aplikasi Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan Terintegrasi (SPEKTRA) yang menjadi tools dalam pengelolaan layanan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, SPEKTRA juga sudah diperkuat melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 69 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan Terintegrasi di Lingkungan BKN (SPEKTRA) di Lingkungan BKN.
- d. Pelaksanaan Layanan Kearsipan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI. Aplikasi ini baru dilakukan kegiatan pendampingan ke seluruh unit kerja pada bulan Februari s.d Maret 2022. Selain itu, penggunaan aplikasi sudah diperkuat dengan adanya Instruksi Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan BKN.
- e. Pelaksanaan layanan kinerja pegawai, pada tahun 2022 ini BKN sudah menggunakan aplikasi kinerja (<https://kinerja.bkn.go.id>) tanggal 29 Juni 2022 dan 05 September 2022.



Gambar 2.3: Sosialisasi Permenpan RB No 6 Tahun 2022 dan Aplikasi eKinerja tanggal 06 Juni 2022
 Sumber : LKJ Settama BKN Tahun 2023



Gambar 2.4: Sosialisasi Permenpan RB No 6 Tahun 2022 dan Aplikasi eKinerja tanggal 05 September 2022
Sumber : LKJ Settama BKN Tahun 2023

- a. Optimalisasi layanan kepegawaian melalui aplikasi presensi terintegrasi (<https://presensi.bkn.go.id>).
Penyederhanaan proses bisnis pada 3 layanan prioritas, yaitu kenaikan pangkat, pensiun dan pindah instansi. Penyederhanaan proses bisnis ini sudah dituangkan dalam POS AP pada masing- masing unit terkait.
- b. Penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN khususnya terkait verifikasi dan approval. PDM berdampak kepada data ASN nasional yang lebih terkini dan mutakhir. Kedepan pada tahun 2023 PDM akan dilanjutkan secara reguler (harian) sehingga data akan terus mutakhir setiap saat tidak pada waktu tertentu saja.
- c. Telah disepakatinya integrasi proses bisnis dalam layanan perencanaan kebutuhan ASN pada SIASN dengan e-formasi Kemenpan RB. Proses bisnis yang terintegrasi ini penting dalam rangka memastikan data peta jabatan dan kebutuhan ASN dari seluruh instansi sesuai berdasarkan data tunggal pada SIASN, sehingga hal tersebut akan berdampak kepada kebijakan pemenuhan formasi ASN secara nasional lebih tepat sasaran.
- d. Untuk mempercepat transformasi digital terutama dalam implementasi penggunaan tanda tangan elektronik seluruh instansi, BKN secara aktif bekerjasama dengan BSRe juga Kominfo membantu instansi yang pejabatnya (PPK, PyB serta kepala Biro SDM/BKPSDM) belum memiliki sertifikat elektronik untuk kita fasilitasi dalam percepatan penerbitannya. Hal tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan dokumen kepegawaian seperti SK KP, Pensiun, Pindah Instansi dll. Akan ada dampak yang sangat signifikan baik waktu maupun biaya jika seluruh PPK dan PyB semua sudah menerapkan TTE.

Namun, upaya implementasi SPBE BKN tahun 2022 tidak lepas dari hambatan, adapun kendala yang dihadapi diantaranya:

- a. Pembentukan tim SPBE mengalami keterlambatan (bulan Mei 2022) yang menyebabkan kinerja tim kurang optimal
- b. Koordinasi efektif tim SPBE BKN tahun 2021 baru dimulai dari bulan Agustus 2022. Sehingga belum seluruh agenda dalam rangka tindak lanjut kelemahan yang tercantum dalam Laporan Penilaian SPBE BKN Tahun 2021 dapat ditindaklanjuti seluruhnya

- c. Beberapa anggota tim ada yang mengalami rotasi dan mutasi yang menyebabkan pengumpulan bukti pendukung mengalami keterlambatan dilakukan kurang optimal
- d. kurangnya tim asesor internal
- e. Belum seluruh anggota tim SPBE memahami tanggung jawab atas indikatornya masing-masing sehingga mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal pengumpulan dokumen penilaian
- f. Pembangunan arsitektur SPBE BKN belum optimal karena adanya prioritas pekerjaan di waktu yang bersamaan.

Meskipun pelaksanaan SPBE BKN tahun 2022 tidak dinilai oleh eksternal, BKN tetap melakukan Penilaian Mandiri sebagai upaya perbaikan atas penilaian tahun 2021 dan persiapan untuk penilaian oleh eksternal pada tahun selanjutnya. Penilaian ini dilakukan oleh tim asesor internal yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 149 Tahun 2022 tentang Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN. Adapun rincian penilaiannya sebagai berikut:

No	Nama Domain/Aspek	Nilai
Indeks SPBE		3,67
Domain 1. Kebijakan SPBE		3,7
1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,7
Domain 2. Tata Kelola SPBE		3,2
2	Perencanaan Strategis SPBE	2,75
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,25
4	Penyelenggara SPBE	4
Domain 3. Manajemen SPBE		2,45
5	Penerapan Manajemen SPBE	2,62
6	Audit TIK	2
Domain 4. Layanan SPBE		4,31
7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3
8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33

Table 2.4 Hasil Penilaian Mandiri SPBE BKN Sumber: Data Diolah Tim SPBE BKN 2022
Sumber : LKJ Settama Tahun 2023

Jika dilihat pada rincian penilaian dan penjelasan masing-masing indikator yang tertuang dalam Laporan Akhir Pelaksanaan SPBE BKN Tahun 2022, ada banyak indikator yang mengalami peningkatan. Sebanyak 14 indikator telah mencapai level 5, diikuti sebanyak 3 indikator yang telah mencapai level 4. Hal ini ditunjang dengan adanya percepatan layanan kepegawaian yang telah dilakukan BKN sehingga pelaksanaan SPBE tahun 2022 ikut mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan target Renstra BKN Tahun 2024, capaian tahun 2022 ini masih terpaut 1,08 poin. Dalam hal ini, BKN optimis dapat mencapai target tersebut dengan melakukan berbagai upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Menyusun satu kebijakan internal memuat seluruh pengelolaan SPBE di BKN dimulai dari arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, Layanan Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK yang mencakup seluruh unit kerja.
- b. Finalisasi pembangunan arsitektur SPBE kepegawaian dan arsitektur SPBE BKN serta Peta Rencana SPBE sekaligus penetapan kebijakan internal yang draf Keputusan Kepala BKN tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BKN

- c. Menuangkan upaya penyederhanaan proses bisnis yang sudah berjalan pada tahun 2022 ini dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis yang diformalkan.
- d. Pelaksanaan forum satu data sebagai bentuk tindak lanjut atas kolaborasi penerapan SPBE
- e. Menyusun dan melakukan penetapan terhadap pedoman manajemen resiko, manajemen aset, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.
- f. Penyempurnaan pembangunan Portal Satu Data ASN. Pada tahun 2023 akan dilakukan pengembangan terkait fitur, dashboard yang nantinya akan memuat penyajian anomaly data. (portal satu data ASN dapat diakses melalui <https://satudataasn.bkn.go.id/data-search>).
- g. Pengembangan aplikasi pendukung dalam layanan akuntabilitas kinerja.

IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
80	81	82	83	85	76,27	2,29	77,29	90,9%

Tabel 2.5 Realisasi IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintahan daerah maupun pusat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Selain itu Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024, asas yang dikedepankan dalam Road Map Reformasi Birokrasi BKN adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola organisasi. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2015 – 2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan di BKN. Beberapa aspek yang bersifat implementatif

telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan Reformasi Birokrasi, implementasi program Reformasi Birokrasi di BKN, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

Berdasarkan Surat dari Kemenpan RB Nomor B/637/RB.06/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN memperoleh nilai 77,29 atau kategori BB. Berikut adalah Laporan Hasil Evaluasi RB yang dirilis oleh Kemenpan RB pada tahun 2020,2021 dan 2022 yang ditampilkan pada tabel berikut.

KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT	INDEKS RB 2020	INDEKS RB 2021	INDEKS RB 2022	
A	KOMPONEN PENGUNGKIT					
	I	PEMENUHAN (20)	20,00	14,52	14,97	15,36
	II	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)	10,00	7,28	6,97	7,71
	III	REFORM (30)	30,00	22,21	22,47	22,03
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT			60,00	44,01	44,41	46,00
B	HASIL					
	1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10,00	7,63	7,71	7,79
	2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,00	8,98	9,64	9,00
	3	PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10,00	9,28	8,96	8,93
	4	KINERJA ORGANISASI (10)	10,00	6,96	5,55	5,57
TOTAL HASIL			40,00	32,85	31,86	31,29
IIINDEKS RB (PENGUNGKIT + HASIL)			100,00	76,86	76,27	77,29

Tabel 2.6 Laporan Hasil Evaluasi RB
Sumber : LKJ SETTAMA BKN Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, indeks Reformasi Birokrasi BKN pada tahun 2022 adalah 77,29. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 71 Laporan Kinerja Sekretariat Utama 2022 1,02 dari nilai RB pada tahun 2021. Pada komponen pengungkit, aspek pemenuhan mengalami peningkatan dari 14,97, menjadi 15,36 demikian juga untuk aspek hasil antara area perubahan mengalami peningkatan dari 6,97 menjadi 7,71. Namun pada aspek reform mengalami penurunan dari 22,47 menjadi 22,03. Penurunan ini disebabkan reform yang dilakukan oleh unit kerja belum optimal. Berikutnya pada komponen hasil, secara umum mengalami penurunan dari nilai 31,86 menjadi 31,29. Pada aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan meningkat dari 7,71 menjadi 7,79. Pada aspek kinerja organisasi meningkat dari 5,55 menjadi 5,57. Selanjutnya untuk aspek kualitas pelayanan publik mengalami penurunan dari 9,64 menjadi 9,00. Demikian juga untuk aspek pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mengalami penurunan dari 8,96 menjadi 8,93. Hal ini

disebabkan oleh perubahan metode pengukuran pada indeks persepsi Anti Korupsi (IPAK). Pada tahun 2022 nilai RB Indeks RB secara keseluruhan mengalami peningkatan dikarenakan BKN telah berupaya melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya aspek komponen pengungkit, namun ada beberapa aspek yg mengalami penurunan yaitu aspek kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. BKN masih perlu memperhatikan fokus reformasi birokrasi tidak hanya pada upaya yg dilakukan, namun pada dampak yang diberikan

IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
75	77	79	80	80	67,33	68,05	68,48	86,6%

Tabel 2.7 Realisasi IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Awal mula lahirnya SAKIP adalah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan tugas lainnya. Dengan adanya SAKIP diharapkan akan adanya perubahan paradigma pemahaman dari yang awalnya “Berapa besar dana yang telah dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan bisa dicapai di akhir periode”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat KemenPAN-RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dengan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga perlu dilakukannya evaluasi SAKIP. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

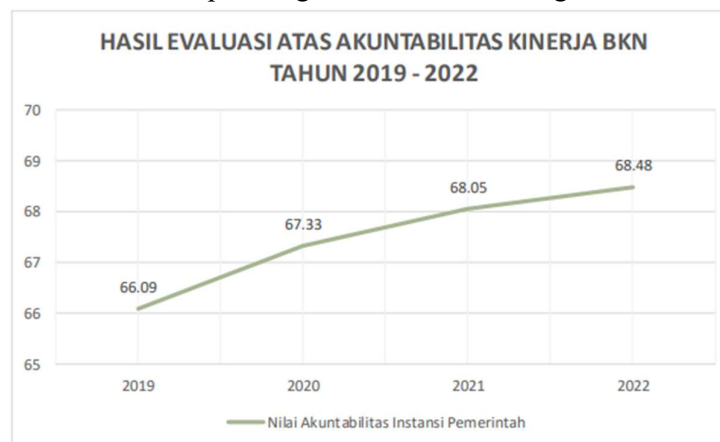
Berdasarkan Surat dari Kemenpan RB Nomor B/704/AA.05/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, BKN memperoleh nilai 68,48 atau predikat B (Baik)

Predikat	Keterangan
AA (>90-100)	Sangat Memuaskan
A (>80-90)	Memuaskan
BB (>70-80)	Sangat Baik
B (>60-70)	Baik
CC (>50-60)	Cukup (Memadai)

Tabel 2.8 Predikat Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi SAKIP

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BKN menunjukkan hasil yang baik, tapi membutuhkan perbaikan. Sebagai gambaran yang lebih rinci, penilaian atas pelaksanaan SAKIP BKN pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.5 Komponen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2020 – 2021

Sumber : LKJ SETTAMA BKN Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi Kemenpan RB, masih terdapat rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh BKN. Sebagai tindak lanjutnya, BKN telah melakukan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut.

- a. Melakukan penyusunan pohon kinerja sebagai upaya menyempurnakan penjabaran kinerja dengan kerangka logis yang mendasarinya;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi Renstra BKN Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan monitoring

dan evaluasi tersebut, BKN perlu melakukan review Renstra atau melakukan penyesuaian atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja untuk mendukung pencapaian visi dan misi BKN;

- c. Melakukan penyusunan SMART-C dalam menyusun Indikator Kinerja dan target kinerja di BKN dan Unit Kerja;
- d. Melakukan pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja ke setiap unit kerja (pusat dan kantor regional) baik secara luring maupun daring untuk menganalisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja serta rencana perbaikan yang memadai guna mendukung tercapainya target kinerja.

Sebelum Kementerian PAN RB merilis nilai AKIP Tahun 2022, penilaian SAKIP BKN sudah dilakukan secara internal. Penilaian ini dilakukan oleh inspektorat dan lingkup penilaiannya adalah Satker di BKN Pusat dan Kanreg. Penilaian internal ini dilakukan dengan menilai beberapa variabel, terutama kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja, seperti Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta objektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Adapun dokumen yang dinilai berdasarkan variabel penilaian internal tersebut adalah Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja)/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, dokumen Rencana Aksi (RA) Tahun 2022 serta dokumen pendukung terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penilaian internal yang sudah dilaksanakan tersebut, nilai pelaksanaan SAKIP BKN pada tahun 2022 adalah sebesar 73,28 atau predikat BB (Sangat Baik). Hasil penilaian tersebut dapat diartikan bahwa AKIP sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem kinerja yang andal.

IKU 5. Level Maturitas SPIP

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
3	3	4	4	4	3,176	3,188	3,999	99,98%

Tabel 2.9 Realisasi IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga)

komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,999” Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara umum telah dilaksanakan dengan efisien. Berdasarkan analisis efisiensi sumber daya, Meskipun sudah diperoleh hasil penilaian mandiri, belum terdapat laporan resmi hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP Badan Kepegawaian Negara untuk tahun 2022 oleh BPKP. Adapun dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, di mana Kementerian/ Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu mendorong tingkat ketercapaian tujuan, menciptakan budaya pengawasan, dan mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub-unsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-unsur penilaian.

Capaian nilai SPIP tahun 2022 telah mendekati target nilai 4. Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian optimal nilai maturitas SPIP. Di antara permasalahan tersebut, yang pertama, masih kurangnya pemahaman tim penilai mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dengan menggunakan sistem yang baru sesuai dengan perban 5 tahun 2021. Kedua, masih kurangnya koordinasi antara tim penilai mandiri dengan tim penjamin kualitas. Dan ketiga, masih belum maksimal dalam unsur penilaian risiko. Hambatan dan masalah yang terjadi dapat diatasi dengan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan, yang pertama, melakukan peningkatan pemahaman tim penilai mandiri dengan cara mengikuti diklat penilaian maturitas SPIP. Kedua, meningkatkan Koordinasi antara tim penilai mandiri dengan tim penjamin kualitas Ketiga, berkoordinasi dengan Tim Manajemen Risiko Indeks dan memonitoring penerapan Manajemen Risiko dilingkungan Badan Kepegawaian Negara

IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
350	350	370	380	390	332,5	N/A	339	86,92%%

Tabel 2.10 Realisasi IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Badan Kepegawaian Negara telah menerapkan Sistem Merit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 dengan pelaksanaan *self-assessment* sepanjang Tahun 2021 dan penilaian pada Tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Negara Nomor 02/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara menetapkan bahwa penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN pada Tahun 2022 ada di kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 339 dan indeks 0,83.

Pada penilaian penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN dilakukan penilaian pada 8 aspek yang terdiri dari Perencanaan Kebutuhan yang memperoleh skor 93,8%; Pengadaan Aparatur Sipil Negara 95%; Pengembangan Karier 70%; Promosi Mutasi 58,3%, Manajemen Kinerja 95%, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 93,8%; Perlindungan dan Pelayanan 100%; dan Sistem Informasi 81,3%. Nilai penerapan Sistem Merit yang diraih Badan Kepegawaian Negara adalah 339 dan mendapatkan piagam Penghargaan dengan kategori Sangat Baik pada acara Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan pada Desember 2022.

Berdasarkan penilaian penerapan Sistem Merit BKN pada 2022, dapat dilihat bahwa aspek Pengembangan Karier dan Promosi Mutasi mendapatkan skor yang belum optimal yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Penilaian Sistem Merit di lingkungan BKN oleh Komisi Aparatur Sipil Negara akan dilakukan kembali pada Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai Sistem Merit pada kategori Sangat Baik dilakukan penilaian dalam kurun waktu 2 tahun sekali. Sekretaris Utama terus berupaya melakukan pemenuhan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang terdapat dalam Keputusan Komisi Aparatur Negara Nomor 02/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Tabel 2.11 Realisasi IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Tercapainya target BKN untuk Indikator Kinerja Opini atas Laporan Keuangan pada Tahun 2022 atas Pemeriksaan BPK RI, dapat dilihat dari penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 43A/LHP/XVI/05/2022 pada tanggal 23 Mei 2022 dengan predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*). Bagi BKN, prestasi ini merupakan pencapaian opini WTP yang ke-13 pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Opini WTP ke-13 ini dipergunakan sebaik mungkin oleh BKN sebagai landasan bahwa pengelolaan keuangan negara di BKN kedepan harus tetap transparan, akuntabel, digunakan dengan tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Area yang memerlukan perhatian dan perbaikan, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 Nomor: 43A/LHP/XVI/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, termasuk bidang administratif dan kaitannya dengan barang milik negara (BMN). Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan manajemen keuangan guna mencegah terulangnya situasi serupa di tahun berikutnya memerlukan peningkatan kecermatan baik dari Kuasa Pengguna Anggaran BKN Pusat maupun Satuan Kerja BKN dalam merealisasikan anggaran dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap spesifikasi teknis pekerjaan.

IKU 8. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
80	82	84	90	93	87.84	91.74	92.65	99.6

Tabel 2.12 Realisasi IKU 8. Nilai Predikat IKPA Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Perolehan nilai IKPA BKN BA 088 dari tahun 2020-2022 cenderung terus meningkat. Yakni dari nilai 87.84 di tahun 2020 menjadi 91.74 di tahun 2021, dan 92.65 di tahun 2022. Meskipun demikian, terdapat indikator yang mengalami kendala selama proses pencapaian nilai maksimal pada tahun 2022, diantaranya yakni rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap jenis belanja yang tercermin pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, masih memerlukan peningkatan. Sedangkan, BKN Kantor Pusat IKU ini masih mendapat nilai 68.09 (nilai 6.81 dari bobot maksimal 10), dengan kata lain indikator Deviasi Halaman III DIPA, masih menjadi indikator yang perlu menjadi perhatian di beberapa satuan kerja. Rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap jenis belanja masih perlu mendapat perhatian di setiap satuan kerja di BKN.

Sekretariat Utama akan terus berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola kinerja pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2022 Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA) BKN Kantor Pusat adalah sebesar 89.02 dengan capaian akhir 98.91% dari target IKPA 90 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022. Dalam penilaian IKPA 2022, Capaian *Output* memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25%, BKN Kantor Pusat pada tahun 2022 mendapat nilai 99,88 (nilai 24,97 dari bobot maksimal 25). Pengisian capaian *output* diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S- 265/KPN.1305/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Data Capaian *Output* pada SAKTI Tahun 2022. Nilai IKPA indikator penyerapan anggaran BKN Kantor Pusat pada tahun 2022 adalah 91,41 (nilai 18,28 dari bobot maksimal 20). Nominal target penyerapan anggaran seharusnya sejumlah Rp 379.263.235.550 dari total pagu anggaran BKN Kantor Pusat Jakarta Rp 408.329.751.000 namun sampai dengan akhir triwulan IV penyerapan anggaran BKN mencapai Rp 395.561.670.823. Kedepan, Sekretariat Utama BKN berusaha untuk memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BKN. Diantaranya dengan melakukan koordinasi, komunikasi, dan pembinaan berkala baik satuan kerja BKN Kantor Pusat, 14 Kantor Regional dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

IKU 9. Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN di Media Online

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
90%	90%	93%	94%	95%	91,76%	85,5%	82,3%	86,63%

Tabel 2.13 Realisasi IKU 9. Persentase Pemberitaan yang Baik tentang BKN di Media Online Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Indikator kinerja utama persentase pemberitaan yang baik tentang BKN di media online bertujuan untuk mengukur jumlah pemberitaan yang baik tentang BKN di media massa dalam kerangka hubungan masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring pemberitaan BKN tahun 2022 terdapat 2.265 berita dengan isu yang banyak diberitakan antara lain Pelaksanaan PPPK dan Penyelesaian Tenaga Honorer. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana juga menjadi top person pemberitaan BKN yang membahas permasalahan terkait Pendataan Non-ASN dan Penyelenggaraan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan yang tidak dilaksanakan secara serentak.

Persentase pemberitaan baik tentang BKN mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pemberitaan bernilai positif yang diperoleh BKN bergantung pada penerimaan audience. Penerimaan Audience BKN atas pemberitaan yang dilakukan oleh BKN pada tahun 2022 ini cenderung negatif sehingga persentasenya menurun. Hal ini disebabkan oleh isu pengunduran diri PNS. Isu ini sangat berpengaruh terhadap perolehan perspektif baik pada pemberitaan BKN. Isu ini bertahan selama lebih kurang 2 (dua) bulan sehingga berpengaruh cukup besar pada persentase pemberitaan nilai positif BKN. Pemberitaan BKN bernilai positif kembali meningkat pada saat BKN mengeluarkan isu terkait penyederhanaan layanan kepegawaian, namun isu tersebut masih belum dapat mengungkit persentase pemberitaan baik dikarenakan masih banyaknya ASN yang menjadi “konsumen” BKN yang masih merasa sulit dalam memperoleh pelayanan kepegawaian.

Untuk mendukung dan meningkatkan ketercapaian IKU persentase pemberitaan baik tentang BKN di media massa pada tahun 2023 maka terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut yaitu meningkatkan klarifikasi atas pemberitaan yang telah beredar baik melalui konferensi pers atau menerbitkan siaran pers dan berita, serta membangun kerja sama dengan berbagai media baik media online maupun media massa sebagai mitra komunikasi BKN.

IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
-	80	81	91	91	69,12	73,13	90,93	99,92

Tabel 2.14 Realisasi IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Kepegawaian Negara sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan. Sesuai Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, evaluasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik dengan memberikan predikat pada Badan Publik sesuai dengan kualifikasi: 1. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100; 2. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9; 3. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9; 4. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; 5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Badan Kepegawaian Negara selaku badan publik yang bertanggung jawab terhadap informasi publik telah berpartisipasi pada kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan mendapat predikat Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 90,93 dari target nilai Keterbukaan Informasi Publik Menuju Informatif dengan nilai 81 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2022. Keberhasilan peningkatan capaian nilai Keterbukaan Informasi Publik disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya telah tersusunnya Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dimiliki oleh Badan Publik.

Untuk mendukung dan meningkatkan capaian nilai keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya melakukan publikasi LHKPN Pimpinan Tinggi pada website BKN, menyusun daftar informasi yang telah habis jangka pengecualiannya, dan membuat aplikasi permohonan informasi secara online.

IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
85	86	87	88	95	81,49	84,01	85,67	90,17

Tabel 2.15 Realisasi IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Indeks kepuasan pelayanan Sekretaris Utama bertujuan untuk mengukur kepuasan layanan stakeholder sebagai pengguna layanan Sekretaris Utama. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan menggunakan metode survei berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama dihitung berdasarkan rata-rata indeks kepuasan layanan yang dicapai oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama. Realisasi indikator ini adalah 85,67 dari target 87 pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama. Indeks kepuasan layanan Biro di lingkungan Sekretariat Utama rata-rata menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tiga dari lima Biro menunjukkan peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun yaitu Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Biro Keuangan, serta Biro Umum. Berikut capaian kepuasan layanan tiap Biro di lingkungan Sekretariat Utama.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama dinilai sudah efisien dengan tingkat efisiensi 0,69%. Artinya tercapainya target kinerja sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan dapat dimanfaatkan dengan sangat baik dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga nilai efisiensi tersebut masih dalam batas normal (maksimal 20% dan minimal adalah -20%)

IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
90%	91%	92%	93%	95%	80%	91%	93,65%	98,57%

Tabel 2.16 Realisasi IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Realisasi yang dicapai pada Tahun 2022 untuk IKU Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya adalah sebesar 93,65% dari target yang ditetapkan sebesar 92% dengan capaian yang berbanding dengan target sebesar 101,79%. Pengukuran IKU Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya menggunakan data yang diperoleh dari Sistem Manajemen Talenta BKN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, tahapan penyelenggaraan Manajemen Talenta meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta serta pemantauan dan evaluasi talenta. Untuk itu dalam mendukung pelaksanaan penempatan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, disusunlah Sistem Informasi Manajemen Talenta Bernama MATA ASN BKN. MATA ASN BKN berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelola, mempertahankan dan juga mengembangkan pegawai-pegawai agar didapatkan talenta-talenta terbaik yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis untuk memenuhi kebutuhan instansi.

Dalam perhitungan dan analisis menggunakan Sistem Manajemen Talenta untuk capaian target IKU Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya, Biro SDM Menyusun *milestone* untuk kluster pegawai yang diidentifikasi, dimana pada Tahun 2022 dilakukan perhitungan untuk kluster Jabatan JFT Madya dan Administrator yang berjumlah 123 Pegawai bertalenta di dalam Box 9 untuk seluruh rumpun Jabatan. Hasil Perhitungan didapatkan 115 pegawai dari 123 pegawai (93%) yang dinilai sesuai dan 8 (7%) pegawai belum sesuai dengan rumpun penempatan pegawai.

IKU 13. Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan sesuai Roadmap RB per Tahun

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.17 Realisasi IKU 13 Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan dan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan sesuai Roadmap RB per Tahun Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2021

Program kegiatan RB di BKN tahun 2022 dilaksanakan dengan mendasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map RB 2020-2024 yang telah disusun kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disusun oleh setiap kelompok kerja area perubahan. RATL 2022 dalam Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN dan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Area Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kegiatan pada area manajemen perubahan secara umum telah terlaksana sesuai dengan target. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum optimal, antara lain (a) kegiatan monitoring dan evaluasi yang baru dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun; (b) menjadikan pimpinan sebagai role model baru 2 (dua) unit yaitu Sestama dan Kedeputian PMK yang sudah melakukan kegiatan yang mana JPT Madya dan JPT Pratama menjadi role model; (c) internalisasi budaya BerAkhlah baru dilakukan sosialisasi namun belum dilaksanakan tindak lanjut setelah sosialisasi tersebut. Kendala yang dihadapi secara umum disebabkan oleh masih kurangnya awareness terhadap pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN. Rekomendasi untuk tahun 2023, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan setiap triwulan serta melaksanakan survey implementasi core values BerAKHLAK di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
2. Area Deregulasi Kebijakan Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/ lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Pada area Deregulasi Kebijakan, seluruh rencana aksi telah dilaksanakan secara komprehensif. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan area Deregulasi Kebijakan adalah masih ada beberapa peraturan di bidang kepegawaian yang perlu direvisi, masih banyaknya peraturan terkait jabatan fungsional yang harus dicabut, serta perubahan regulasi atau kebijakan manajemen kepegawaian yang sangat

dinamis dan cepat berubah sehingga sulit dalam melakukan pemetaan keterkaitan.

Secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di area deregulasi kebijakan berjalan cukup baik yang ditandai dengan telah tercapainya seluruh tindak lanjut dan pada saat evaluasi dengan tim penilai berjalan dengan lancar meskipun terdapat saran agar BKN tidak hanya berfokus kuantitas tetapi kualitas peraturan perundang-undangan di bidang manajemen kepegawaian. Pada tahun 2023, akan dilakukan penguatan dari sisi kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Pada area Penataan dan Penguatan Organisasi telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan RATL yang telah ditetapkan dan pada aspek tertentu telah melebihi target yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa kendala, antara lain: (1) Kebijakan kelembagaan belum terarah; (2) Standardisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kantor Pusat, Kantor Regional, dan UPT yang belum selaras; serta (3) Intervensi pihak lain terkait yang tidak sesuai dengan norma. Adapun rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2023 pada area Penataan dan Penguatan Organisasi adalah Pemenuhan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam tindak lanjut terutama pada penguatan dan pengayaan tugas dan fungsi unit organisasi untuk menghasilkan organisasi dan tata kerja yang optimal. Disamping itu, perlu adanya penguatan implementasi BerAKHLAK antara unit organisasi serta antarinstansi terutama dalam aspek kolaborasi.

4. Area Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. telah dilakukan namun belum ada tindak lanjut. Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan pada tahun 2023 adalah melanjutkan penyusunan roadmap SPBE BKN, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI di seluruh unit/satuan kerja, serta menindaklanjuti hasil revidi proses bisnis.

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Secara umum, pada area Penataan Sistem Manajemen SDM telah dilaksanakan sesuai dengan RATL. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti: (1) aplikasi e-kinerja yang masih dalam tahap penyempurnaan; (2) pemetaan belum dilakukan secara optimal untuk Pejabat Pimpinan Tinggi; serta (3) penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kompetensinya (belum ada sistem rotasi dan mutasi kepegawaian). Adapun rencana perbaikan pada tahun 2023

yang perlu diperhatikan diantaranya: (1) penambahan fitur dialog kinerja, konseling kinerja, dan pedoman pemberian rating; (2) mengusulkan kepada unit penilai kompetensi untuk melakukan penilaian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; serta (3) penempatan pegawai disesuaikan dengan klaster kompetensi jabatan.

6. Area Penguatan Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:
 - a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;
 - b. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi;
 - c. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;
 - d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
7. Area Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing - masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

IKU 14. Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara Elektronik

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
100	100	91	N/A	N/A	100	90	91,33	N/A

Tabel 2.18 Realisasi IKU 14. Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja pada tahun 2022 terkait dengan IKU Persentase Realisasi Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian sebesar 91,33 lebih tinggi dibandingkan target yang sudah ditetapkan yaitu 91.

Persentase paket pengadaan yang dilakukan secara elektronik dengan melihat jumlah paket yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE dalam bentuk persen. Monitoring dan evaluasi paket yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE 4.3.

IKU 15. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
92%	92%	92%	92%	92%	94%	85%	94,25%	102,44%

Tabel 2.19 Realisasi IKU 15. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, kerja sama antar lembaga adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah baik dalam dan luar negeri untuk mencapai tujuan bersama. Indikator persentase dokumen kerja sama yang disepakati bertujuan untuk mengukur seberapa banyak kerja sama yang dilaksanakan per tahunnya baik dalam bentuk kerja sama dalam dan luar negeri. Jumlah dokumen kerja sama yang berhasil disepakati sepanjang tahun 2022 adalah 82 dokumen kerja sama terdiri dari 45 dokumen kerja sama dalam negeri dan 37 dokumen kerja sama luar negeri. Berikut rincian kerja sama yang dilakukan sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Negara bekerja sama dengan berbagai instansi untuk

mendukung tercapainya target kinerja. Instansi tersebut terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, BUMN, dan BUMD. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara juga bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi internasional, dan lembaga lainnya di luar negeri yang berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah Indonesia. dokumen kerja sama yang disepakati adalah 94,25% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama sebesar 92%. Persentase dokumen kerja sama yang disepakati pada tahun 2022 telah melampaui Target Rencana Strategis Sekretariat Utama dan mengalami peningkatan persentase sebesar 9,25% dari tahun 2021.

Peningkatan capaian disebabkan telah menurunnya Covid-19 sehingga kerja sama yang dapat difasilitasi meningkat meskipun dengan anggaran kerja sama yang terbatas. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kerja sama yang difasilitasi, mengutamakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara. contohnya kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia tentang Pengintegrasian Data pada Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah New Version (SIAPP NV) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.

Keberhasilan peningkatan persentase dokumen kerja sama yang disepakati tidak lepas dari komitmen Sekretariat Utama untuk memfasilitasi kerja sama Badan Kepegawaian Negara dengan stakeholder BKN. Untuk mendukung dan meningkatkan capaian persentase jumlah dokumen kerja sama yang disepakati pada tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama akan menindaklanjuti pembangunan Aplikasi Kerja Sama (SIKERMA) hingga sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis kerja sama dalam dan luar negeri.

IKU 16. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder lainnya

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
95%	95%	96%	96%	97%	98,2	93	96	98,96

Tabel 2.20 Realisasi IKU 16. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder lainnya Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Badan Kepegawaian Negara sebagai badan publik memiliki tugas untuk melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat atau stakeholdernya. Diseminasi informasi tersebut salah satunya melalui publikasi program dan kegiatan BKN pada media dan lembaga stakeholder lainnya. Media yang digunakan untuk publikasi diantaranya Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Youtube, dan Website.

Target publikasi program dan kegiatan BKN pada tahun 2022 yakni sebesar 2.160 unggahan dengan perhitungan 1 hari kerja melakukan 3 unggahan pada 3 media. Realisasi persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 96% dari target 98,3% yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama. Jika dibandingkan persentase publikasi program dan kegiatan BKN tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan. Penurunan jumlah publikasi salah satunya didasari oleh perubahan sistem pengelolaan media sosial dan kebijakan pola diseminasi informasi yang disebabkan pada sifat dari informasi yang akan di diseminasikan.

Untuk target yang dirumuskan yakni 3 unggahan x 240 hari x 3 media = 2.160 unggahan dalam satu tahun. Adanya perubahan pola diseminasi dimana terdapat 1 bahan publikasi (unggahan) yang hanya diunggah pada 2 atau 1 media saja, hal ini mempengaruhi penurunan jumlah publikasi pada media sosial. Selain dari faktor perubahan kebijakan tersebut, jumlah konten yang diolah pun cenderung menurun karena menyesuaikan penyusunan agenda setting yang disusun berdasarkan agenda kegiatan utama unit BKN. Perbandingan persentase publikasi program dan kegiatan BKN pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan sebesar 3%, hal tersebut dipengaruhi oleh pemberitaan masif terkait penerimaan CPNS, dimana BKN menyampaikan informasi secara lengkap berdasarkan keluhan dan aduan stakeholder BKN.

Pada tahun berikutnya Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama sebagai pengampu IKU berkomitmen untuk mendukung dan meningkatkan capaian salah satunya dengan menyusun strategi komunikasi sehingga persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN dapat tercapai.

IKU 17. Indeks Profesional ASN Settama BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
80	80	81	81	82	67,77	76,13	74,11	90,37%

Tabel 2.21 Realisasi IKU 17. Indeks Profesional ASN Settama Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Pada Tahun 2022, realisasi IKU Indeks Profesional ASN Sekretariat Utama BKN mencapai nilai rata-rata sebesar 74,11 dari target yang ditetapkan sebesar 81 (91,49%) dan mendapatkan kategori “Sedang”. Apabila diklasifikasikan perdimensi, indeks yang didapat adalah Kualifikasi: 13,68 Kompetensi: 31,15 Kinerja: 24,44 dan Disiplin: 4,86. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi dengan bobot 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi nilai Indeks Profesionalitas ASN, dimana hasil yang didapat sepenuhnya diambil melalui portal <https://ip-jasn.bkn.go.id/> yang datanya bersumber dari aplikasi SAPK BKN.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan Indeks Profesional ASN Sekretariat Utama BKN pada Tahun 2022 sebesar 74,12 memang mengalami penurunan dibandingkan nilai yang diperoleh pada Tahun 2021 sebesar 76,13, Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa dimensi di unit kerja di lingkup Sekretaris Utama yang memperoleh nilai yang masih belum optimal/kurang.

IKU 18. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
65	100	100	100	100	95	95	100	97

Tabel 2.22 Realisasi IKU 18. Persentase Pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Settama Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama BKN pada tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa BKN dalam hal ini Sekretariat Utama berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah mencapai nilai 3 dengan kategori baik.

Berbagai layanan digital yang sudah diterapkan antara lain BKN LBP, SIPENDEKAR, E-Kinerja, Aplikasi SPSE, SIONI, SIPEPI, SPID, Digital Signature, SIMONBAJA, Aplikasi Surat, Aplikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab, serta SIAVA. Pengembangan pemanfaatan aplikasi dan teknologi

IKU 19. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
36	36	36	36	36	35,45	35,45	32,39	89,97%

Tabel 2.23 Realisasi IKU 19. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup BKN Tahun 2022

Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan angka yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama yang dilakukan secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, komponen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi untuk unit kerja adalah:

Aspek	Bobot	Sub Komponen
Pemenuhan	14,6	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Perubahan (2) Deregulasi Kebijakan (0,75) Penataan dan Penguatan Organisasi (2) Penataan Tata Laksana (1) Penataan Sistem Manajemen SDM (1,4) Penguatan Akuntabilitas (2,5) Penguatan Pengawasan (2,1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,39)
		Total aspek pemenuhan = 14,14
Reform	21,7	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Perubahan (1,9) Deregulasi Kebijakan (1,5) Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5) Penataan Tata Laksana (3,75)
		<ul style="list-style-type: none"> Penataan Sistem Manajemen SDM (1,94) Penguatan Akuntabilitas (1,97) Penguatan Pengawasan (1,93) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,74)
		Total aspek reform = 18,25
Total	36,6	32,39

Tabel 2.24 Tabel Komponen Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Unit Kerja

Sumber : LKJ SETTAMA BKN Tahun 2023

Adapun penurunan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2022 terjadi pada aspek pemenuhan pada area deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada aspek reform penurunan terjadi pada area manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, terjadi peningkatan pada aspek reform di area penataan tata laksana dan penataan sistem manajemen SDM. Dalam proses mendukung terlaksananya reformasi birokrasi, Sekretariat Utama telah menyusun Tim

Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Utama BKN dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama Nomor 11.1 Tahun 2022 tanggal 01 Maret 2022

IKU 20. Skor atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretaris Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
84	84	84	80	86	71,96	73,95	72,55	85,35%

Tabel 2.25 Skor atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretaris Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Sesuai dengan Asas Akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dalam rangka menjalankan Asas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP di lingkup BKN dilaksanakan penilaiannya oleh Inspektorat dan dilakukan terhadap unit setingkat Eselon I. Sekretaris Utama BKN sebagai unit setingkat Eselon I di BKN juga telah dievaluasi pelaksanaan AKIP Tahun 2022 oleh inspektorat yang hasil evaluasinya dapat dilihat pada Laporan Nomor 094.0/AI.03/LHE/H/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, menunjukkan bahwa Sekretaris Utama memperoleh nilai sebesar 72,55 (tujuh puluh dua koma lima puluh lima) atau predikat BB (Sangat Baik). Hasil penilaian tersebut dapat diartikan bahwa AKIP sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem kinerja yang andal.

IKU 21. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
98	99	100	100	100	79,70	85	97,68	97,68

Tabel 2.26 Realisasi IKU 21. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Lingkup Sekretariat Utama BKN Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN adalah mengukur seberapa besar serapan anggaran yang ada di Sekretariat Utama dengan membandingkan perencanaan anggaran dan fisik yang sudah disusun. Sekretariat Utama dalam DIPA tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp322.070.540.000, anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp314.600.382.726, atau sebesar 97.68%.

Realisasi anggaran tertinggi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama pada tahun 2022 adalah pada Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama dengan pagu anggaran sebesar Rp1,631,084,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp1,629,907,00599,- atau sebesar 99.93%.

Faktor Keberhasilan yang utama pada unit kerja Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama dalam pencapaian realisasinya di antara lain adalah:

1. Kegiatan di unit kerja sebagian besar terlaksana semua. Jika ada kegiatan yang kemungkinan besar tidak bisa terserap, maka unit kerja harus segera mengajukan revisi POK pada kegiatan yang lain sehingga penyerapan bisa maksimal;
2. *Revolving* GU dilakukan setiap bulan;
3. Pemaksimalan penyerapan pada pengajuan tagihan saat PTUP.

Sedangkan posisi terendah pada realisasi Biro Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp237,645,567,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp230,755,244,626,- atau sebesar 97,10%. Kendala yang menghambat terlaksananya penyerapan dana salah satunya adalah adanya kebijakan eksternal sehingga tidak dibayarkannya Tunjangan Kinerja ke-13 dan ke-14 yang berdampak pada tidak terserapnya anggaran. Sedangkan, untuk realisasi belanja operasional telah terserap dengan maksimal yakni 99,57%. Kedepan direncanakan adanya evaluasi rutin dan penyesuaian dengan perencanaan, sehingga kelebihan anggaran bisa dialokasikan dengan lebih baik. Realisasi anggaran tertinggi satuan kerja di lingkungan Kantor Pusat BKN pada tahun 2022 adalah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari dengan pagu anggaran sebesar Rp10.383.214.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp10.380.928.592,- atau sebesar 99.98%. Faktor Keberhasilan yang utama pada satuan kerja Kantor Regional XIV BKN Manokwari dalam pencapaian realisasinya adalah dikarenakan jumlah peserta PPPK yang jauh melebihi dari target, dari Target 9.650 peserta terealisasi sebanyak 16.193 peserta atau 167,8%. Sedangkan posisi terendah pada Satuan Kerja Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh dengan pagu anggaran sebesar Rp9.794.994.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.214.274.154 atau sebesar 94.07%. Kendala utama terdapat pada anggaran pengadaan PPPK yang tidak sesuai target, dengan sisa anggaran seleksi PPPK sebesar Rp531.000.000

IKU 22. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d. 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.27 Realisasi IKU 22. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja Settama Tahun 2022

Dari 15 (lima belas) rekomendasi BPK atas Temuan Pemeriksaan di Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun Anggaran 2021, Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama telah menindaklanjuti temuan dan catatan dalam Laporan Keuangan dengan memberikan tanggapan atas rekomendasi BPK. Adapun dari 10 (sepuluh) rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum terselesaikan di Semester I 2023 ini, terdiri dari 4 temuan administratif, 3 temuan terkait audit kinerja, dan 3 temuan yang harus menyetorkan ke kas negara. Dalam hal ini pada tahun anggaran 2022 di lingkungan Sekretariat Utama, yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK, adalah unit kerja Biro Umum, namun Biro Umum telah selesai menindaklanjuti rekomendasi dari temuan BPK TA 2022, sehingga capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Temuan hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat telah tercapai sesuai dengan target.

BAB III RENCANA KERJA 2024

A. Sasaran Strategis

Sekretariat Utama BKN melaksanakan sasaran strategis ke-7 hingga 10 Badan Kepegawaian Negara seperti tersebut sebelumnya. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Utama BKN sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Diturunkan menjadi Sasaran Strategis Sekretaris Utama BKN dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024
Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

1. *Customer Perspective* terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis (SS), sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
 - b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses;
 - c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
 - d. Sasaran Strategis 4: Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel;
 - e. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif;
 - f. Sasaran Strategis 6: Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
2. *Internal Process Perspective* merupakan proses yang harus dilakukan Sekretaris Utama untuk mencapai output dan *outcome* yang diharapkan. Terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis, sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis 7: Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi;
 - b. Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB

- BKN;
- c. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel;
 - d. Sasaran Strategis 10: Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN;
 - e. Sasaran Strategis 11: Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal.
3. *Learn and Growth Perspective* Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Sekretaris Utama BKN. Terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Sasaran Strategis 12: Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten;
 - b. Sasaran Strategis 13: Tersedianya sistem informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses;
 - c. Sasaran Strategis 14: Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
 - d. Sasaran Strategis 15: Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

B. Indikator dan Target Kinerja 2024

Tahun 2024 merupakan tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong transformasi ekonomi agar tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan pasca pandemi sehingga sasaran jangka menengah dan panjang Indonesia terwujud. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan juga berintegritas dimana penguatan sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan publik yang baik dan memudahkan akses sumber daya manusia Indonesia menjadi bertumbuh, semakin kompetitif dan maju. Disinilah Badan Kepegawaian Negara mengambil peran untuk membuat kebijakan-kebijakan teknis yang berpihak kepada masyarakat pada umumnya dan juga kepada Aparatur Sipil Negara yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat sehingga Indonesia mampu bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat.

Untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara menetapkan Sasaran Rencana Kerja 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
Customer Perspective				
1.	Terwujudnya ASN BKN yang Kompeten	1	Indeks Profesionalitas ASN BKN	82
2.	Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses	2	Indeks Maturitas SPBE BKN	4
3.	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	3	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	85
		4	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	80
		5	Level Maturitas SPIP	4
		6	Nilai Pelaksanaan Sistem Merit	390
4.	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel	7	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP
		8	Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	93
5	Terwujudnya hubungan Masyarakat yang efektif	9	Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN	94
		10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91 (Informatif)
6	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama	11	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama	95
Internal Process Perspective				
7	Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi	12	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	95

8	Terselenggaranya RB BKN sesuai <i>roadmap</i> RB BKN	13	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN	100
		14	Indeks Pengelolaan Aset	3.5
		15	Indeks Tata Kelola PBJ	84
		16	Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI	80
9	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel	17	Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat	75
10	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN	18	Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati	95
11	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal	19	Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya	98.3
<i>Learn And Growth Perspective</i>				
12	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten	20	Indeks Profesional ASN Settama BKN	82
13	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses	21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama	100
14	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	22	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Sekretariat Utama	100
		23	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	80
15	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel	24	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Utama	100
		25	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil	100

			Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	
--	--	--	---	--

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretaris Utama
Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretaris Utama

Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara menetapkan Indikator Kinerja Utama turunan dari masing-masing Sasaran Strategis yang direncanakan akan dicapai dengan target dan anggaran beserta dasar penetapan target sebagaimana tertera pada penjelasan di halaman selanjutnya.

SS. 1. Terwujudnya ASN BKN yang Kompeten

IKU 1. Indeks Profesionalitas ASN BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
70,42	78,42	76,18	N/A	80	80	82	Rp181.000.000,-

Tabel 3. 2 Rencana Target IKU 1. Indeks Profesional ASN BKN Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap Tahunnya. Sesuai dengan hal tersebut, melalui Sekretaris Utama dilakukan pengukuran dan perhitungan nilai Indeks Profesionalitas di lingkungan BKN.

Pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN sendiri dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN

Pada Tahun 2022, realisasi yang dicapai pada IKU Indeks Profesional ASN BKN sebesar 76,18 dimana perhitungan data pada Tahun 2021 digunakan sebagai dasar capaian Indeks Profesionalitas ASN BKN pada Tahun 2022. Kemudian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, telah dilakukan rekapitulasi dari data perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BKN pada Tahun 2022 dan diperoleh nilai sementara Indeks Profesionalitas ASN BKN Tahun 2023 adalah sebesar 79,06 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Dari hasil pengukuran sementara tersebut, terlihat terdapat peningkatan capaian dari Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan rincian

perolehan nilai dimensi Kualifikasi sebesar 21,09, dimensi Kompetensi sebesar 27,98, dimensi Kinerja sebesar 25,02 dan dimensi Disiplin 4,97.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dimensi Kompetensi menjadi salah satu yang memiliki nilai kurang optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah terdapat pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme *inpassing*/perpindahan dari jabatan lain yang belum mengikuti pelatihan fungsional terkait (pelatihan tersebut bukan merupakan syarat wajib untuk dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang akan diampu), akan tetapi pada SIASN syarat mengikuti pelatihan fungsional dijadikan sebagai bobot penilaian pada dimensi kompetensi teknis untuk pejabat fungsional sehingga nilai kompetensi pada beberapa pegawai yang menjabat sebagai pejabat fungsional tersebut tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut kedepannya akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jabatan ASN untuk pembobotan nilai kompetensi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme *inpassing*/perpindahan jabatan.

Selain hal di atas, pada Tahun 2023 berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN, diantaranya dengan dilakukan pendampingan dan pelaksanaan *Coaching, Mentoring* dan Belajar Mandiri (CMB) sebanyak 446 kegiatan di sejumlah unit di lingkungan BKN, terselenggaranya Tugas Belajar, Tugas Belajar Biaya Mandiri dan Pencantuman Gelar sebanyak 85 pegawai, terselenggaranya 66 kegiatan Komunitas Belajar, 48 kegiatan Pelatihan Teknis dan sejumlah Pelatihan Manajerial bagi JPT Pratama BKN serta telah dilaksanakan sosialisasi SE Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Presentasi Peningkatan Pendidikan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada September 2023.

Adapun target yang ingin dicapai untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN BKN pada Tahun 2024 adalah 82. Target tersebut ditetapkan lebih tinggi 2 poin dari target yang ada pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Hal tersebut sejalan dengan hasil sementara nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN yang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah meningkat dari Tahun sebelumnya. Hasil sementara tersebut juga menunjukkan tren positif untuk nilai final Indeks Profesionalitas ASN BKN Tahun 2023 yang secara Nasional baru akan keluar di Triwulan IV Tahun 2023. Selain itu, penetapan target yang lebih tinggi pada Tahun 2024 sejalan dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN BKN. Berikut beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan pengukuran dan penilaian Indeks Profesionalitas ASN BKN untuk periode berikutnya:

1. Mempermudah pegawai dalam mengakses informasi Tugas Belajar dan Penawaran Beasiswa dalam rangka peningkatan kualifikasi pegawai yang ada di Instansi BKN dan melakukan kerjasama dengan instansi baik itu instansi pemerintah maupun BUMN untuk pelaksanaan magang antar instansi;
2. Mendorong tiap unit kerja Pusat maupun Kantor Regional untuk memanfaatkan Aplikasi CMB (*Coaching, Mentoring*, dan Belajar Mandiri) serta Komunitas Belajar sebagai sarana peningkatan kompetensi non klasikal bagi pegawai;
3. Melakukan kerja sama dengan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dalam rangka penyelenggaraan pelatihan teknis untuk internal BKN;
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait mengenai kendala yang terjadi dalam

pengukuran dimensi khususnya dimensi Kompetensi dan Kinerja

5. Melakukan rekonsiliasi serta update data secara berkala pada aplikasi SIASN terkait dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pegawai.

SS.2. Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang Handal dan Mudah Diakses
IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
2,84	2,92	2,92	N/A	4	4	4	Rp3.040.000,-

Tabel 3.3 Rencana Target IKU 2. Indeks Maturitas SPBE BKN Tahun 2024
 Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Indeks maturitas SPBE BKN merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBE di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kategori indeks SPBE sebagai berikut: < 1,8 : kurang 1,8 – 2,6 : cukup 2,6 – 3,5 : baik 3,5 – 4,2 : sangat baik 4,2 – 5,0 : memuaskan. Tidak terpenuhinya nilai indeks maturitas SPBE mengindikasikan ketidakpatuhan BKN terhadap Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kurang mendukung tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Indeks Maturitas SPBE BKN ini merupakan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja antara lain:

- a. Melakukan reviu arsitektur SPBE yang sejalan dengan peta proses bisnis sesuai mandat peraturan perundang-undangan;
- b. Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan, serta akan dimasukkan ke dalam pembahasan khusus terkait dengan penyusunan rancangan OTK terbaru dan merumuskan serta memperkuat tugas fungsi Sekretariat Utama dalam koordinasi implementasi kebijakan SPBE.

Untuk itu, pada tahun 2024 BKN optimis menetapkan target 4.

SS.3. Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
75,04	76,86	77,29	N/A	85	85	85	Rp130.400.000,-

Tabel 3.4 Rencana Target IKU 3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Indeks pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. Makna reformasi birokrasi adalah:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan
2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Pada tahun 2024, IKU indeks reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 85. Penetapan target ini diselaraskan dengan target capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020- 2024 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis BKN tahun 2020-2024. Penetapan target sebesar 85 ini selain mendasarkan pada target yang dipaparkan dalam rencana strategis BKN. Target sebesar 85 pada tahun 2024 sebenarnya termasuk jauh jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya (2022) sebesar 76,27. Namun demikian, angka 85 masih realistis sebagai target yang harus dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN pada tahun 2024. Hal ini didukung perubahan kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Menindaklanjuti hal tersebut, BKN Telah menetapkan Keputusan Kepala BKN Nomor 178/KEP/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2020-2024. Meskipun hasil evaluasi (LHE) belum disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB,

namun demikian dari hasil pemaparan ketika evaluasi dilakukan oleh evaluator eksternal (Kementerian PAN dan RB), telah terdapat beberapa kegiatan reformasi birokrasi yang tercapai output dan juga beberapa yang telah memiliki dampak yang signifikan.

IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
66,09	67,33	68,48	N/A	85	85	80	Rp1.797.595.000,-

Tabel 3.5 Rencana Target IKU 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh Kemenpan RB dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil Laporan Evaluasi yang telah dikeluarkan oleh KemenPAN RB dalam periode Renstra tahun 2020-2024, skor atau nilainya mengalami tren kenaikan yang positif setiap tahunnya. Penilaian dari 5 (lima) komponen yang dimulai dari Perencanaan kinerja sampai dengan Capaian Kinerja rata-rata mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 0,72%. Terdapat beberapa rekomendasi dari evaluator KemenPAN RB dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kerja yang harus ditindaklanjuti secara seksama dan berkelanjutan, yaitu:

1. Menyempurnakan sasaran dan indikator di tingkat pusat dengan berdasarkan pada penjenjangan kinerja yang logis;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada unit kerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunannya agar kualitas indikator kerjanya lebih terukur, relevan dan berorientasi hasil;
3. Menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan target kinerja tahun berikutnya;
4. Memperkuat peran pimpinan, melakukan dialog kinerja dengan seluruh unit untuk mengevaluasi

- dan merumuskan strategi kedepannya;
5. Mendorong upaya koordinasi lintas sektor atau crosscutting dengan memperhatikan aspek kolaborasi;
 6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan memanfaatkan hasil analisis untuk perbaikan strategi kedepannya;
 7. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, memantau dan memonitoring agar rekomendasi ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti rekomendasi di atas terkait dengan target capaian tahun 2024, bahwa untuk target atas Skor hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN tahun 2024 ditetapkan sebesar 80 di bawah target Renstra yang sudah direncanakan yaitu 85 karena melihat capaian history realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai target Renstra tidak memungkinkan dapat dicapai pada tahun ini, dibutuhkan effort, sinergitas dan dukungan penuh dari semua pihak baik di unit kerja eselon I dan II.

IKU 5. Level Maturitas SPIP

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	3,181	3,99	N/A	-	4	4	-

Tabel 3.6 Rencana Target IKU 5. Level Maturitas SPIP Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Berdasarkan hasil validasi Penilaian baseline atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kami menyarankan Sekretaris Utama BKN agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana tindak perbaikan penyelenggaraan SPIP terintegrasi berdasarkan hasil identifikasi Area of Improvement (AoI) yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja maupun tingkat instansi
2. Melakukan perbaikan dengan prioritas antara lain:
 - a. Melakukan reuiu Rencana Strategis 2020-2024 terutama untuk memperbaiki beberapa sasaran/outcome dan indikator utama atas program, beberapa output dan indikator output program, beberapa sasaran dan indikator kegiatan, serta penetapan target kinerja agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART.
 - b. Implementasi pedoman pelaksanaan manajemen risiko terutama untuk melaksanakan identifikasi dan penilaian risiko strategis tingkat instansi dan risiko fraud serta rencana tindak pengendaliannya.
 - c. Melaksanakan evaluasi atas efektifitas implementasi kebijakan secara komprehensif dan berkala untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi implementasi dalam pencapaian tujuan

- organisasi, terutama terhadap implementasi kebijakan utama yang mendukung tugas dan fungsi organisasi.
- d. Evaluasi dan pemutahiran proses bisnis sesuai dengan tujuan dan tata kerja organisasi BKN.
 - e. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan oleh APIP dengan berbasis risiko.

IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
332,5	332,5	339	N/A	N/A	390	390	-

Tabel 3.7 Rencana Target IKU 6. Nilai Pelaksanaan Sistem Merit Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem Merit merupakan kebijakan dalam Manajemen ASN yang didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam penilaian Sistem Merit, terdapat 8 aspek penilaian yaitu Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Pegawai, Pengembangan Karier, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, serta Sistem Informasi.

Pada Tahun 2022, capaian pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan BKN memperoleh nilai sebesar 339 dengan kategori predikat “Sangat Baik” berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Negara Nomor 02/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Capaian nilai Sistem Merit BKN tersebut masih belum optimal dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya diperlukan perbaikan pada aspek Pengembangan Karir serta aspek Promosi dan Mutasi yang masih memiliki beberapa catatan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BKN. Penilaian Sistem Merit di lingkungan BKN oleh Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan dilakukan kembali pada Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai Sistem Merit pada kategori “Sangat Baik” dilakukan penilaian dalam kurun waktu 2 tahun sekali.

Pada tahun 2023, meskipun tidak dilaksanakan penilaian Sistem Merit di lingkungan BKN, Sekretariat Utama kerap melakukan upaya dalam meningkatkan nilai Sistem Merit dengan memfokuskan pada pemenuhan rekomendasi tindak lanjut dari penilaian KASN pada tahun 2022. Sekretariat Utama melalui Biro SDM pada tahun 2023 telah melakukan pendampingan kepada

unit kerja dalam rangka pengisian dan penyusunan formulir *Individual Development Plan* (IDP), yang akan mengutamakan metode pengembangan kompetensi melalui aplikasi CMB. Formulir IDP yang telah disusun oleh pimpinan unit kerja tersebut akan dijadikan sebagai salah satu penyempurnaan *database* aplikasi Manajemen Talenta BKN. Pada triwulan III Tahun 2023, SE Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Manajemen Talenta juga telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penerapan Manajemen Talenta di lingkungan BKN, hal tersebut juga menjadi salah satu upaya pemenuhan rekomendasi KASN terkait perbaikan dalam 8 (delapan) aspek dalam penilaian Sistem Merit BKN.

Selain berfokus pada melakukan agenda dan kegiatan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari KASN terkait Penilaian Sistem Merit BKN, Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dalam mendukung penerapan Sistem Merit BKN di tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian penerapan Sistem Merit tahun 2022 di lingkungan BKN yang dilaksanakan oleh KASN. Hasil kegiatan tersebut digunakan untuk tindak lanjut peningkatan nilai Penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN pada tahun 2024 mendatang;
2. Telah disahkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Manajemen Talenta di Lingkungan BKN dan Surat Edaran tersebut sudah dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penerapan Manajemen Talenta dalam upaya untuk peningkatan nilai penerapan Sistem Merit di BKN;
3. Menyusun buku saku Manajemen Talenta yang berisi tentang paparan singkat terkait Manajemen Talenta dan SE Kepala BKN No. 4 Tahun 2023;
4. Biro SDM juga telah menyampaikan hasil pemetaan kompetensi pegawai pada pimpinan tiap unit kerja Pusat maupun Kantor Regional, untuk kemudian akan disusun dalam rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui formulir *Individual Development Plan* (IDP). IDP yang disusun oleh pimpinan unit kerja dan pegawai ini juga akan digunakan sebagai salah satu upaya untuk penyempurnaan *database* aplikasi Manajemen Talenta BKN;
5. Biro SDM melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Manajemen Talenta dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam membangun Manajemen Talenta di lingkungan BKN;
6. Melakukan penyempurnaan Sistem dan pengembangan fitur Aplikasi Manajemen Talenta “MATA ASN BKN”.

Adapun target yang ingin dicapai untuk IKU Nilai Pelaksanaan Sistem Merit pada Tahun 2024 adalah 390. Target tersebut sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Selain itu, upaya yang dilakukan Sekretariat Utama dalam pemenuhan rekomendasi tindak lanjut dari penilaian KASN pada Tahun 2022 terutama dalam pengelolaan Manajemen Talenta menjadi argumen optimis dalam capaian penilaian Sistem Merit di Tahun 2024. Upaya pemenuhan rekomendasi akan terus dilaksanakan, berikut beberapa rencana aksi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penilaian Sistem Merit di Tahun 2024:

1. Penyusunan bukti dukung penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN
2. Verifikasi dan penyusunan Berita Acara penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN
3. Penyusunan laporan penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN

SS. 4 Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel
IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Rp331.020.000,-

Tabel 3.8 Rencana Target IKU 7. Opini atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2024
 Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BPK RI, sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kewajiban BPK RI ini, mengawali pemberian opini atas Laporan Keuangan berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Opini wajar tanpa pengecualian akan diberikan terhadap laporan keuangan asalkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Laporan keuangan harus lengkap;
2. Bukti audit yang diperlukan harus tersedia secara lengkap;
3. Tiga standar umum harus diikuti sepenuhnya dalam proses pemeriksaan;
4. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tetap konsisten;
5. Tidak ada ketidakpastian yang signifikan terkait dengan kelangsungan usaha di masa mendatang (*going concern*).

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan mencerminkan pendapat sebagai pernyataan profesional pemeriksa keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan tersebut. Pentingnya opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Instansi menjadi dasar untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, dengan target mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP menjadi tujuan opini atas Laporan Keuangan BKN tahun anggaran 2023 dan pada target pencapaian kinerja di tahun 2024 sesuai dengan target pada Renstra Sestama dan Renstra BKN.

Pada tahun 2023, upaya teknis yang dilakukan oleh Sestama dalam mempertahankan capaian Opini BPK dengan predikat WTP antara lain adalah:

1. Memberikan tanggapan atas hasil temuan sementara pemeriksa BPK;
2. Melakukan rekonsiliasi tiga pihak antara BKN, BPK dan Kementerian Keuangan;
3. Melakukan penyesuaian/perbaikan pada Laporan Keuangan (menghasilkan Laporan Keuangan *Audited*);
4. Mengkoordinasikan dengan unit kerja dan satuan kerja terkait hasil temuan BPK dan melakukan langkah perbaikannya sebelum dan saat *exit meeting* atas pemeriksaan laporan keuangan BKN TA. 2022;
5. Menganalisis laporan untuk persiapan penyusunan Laporan Keuangan BKN Semester I TA. 2023;
6. Menyusun Laporan Keuangan BKN Semester I TA. 2023 dan Laporan Keuangan BKN TW III TA. 2023.

Pada tahun 2024, target opini atas Laporan Keuangan BKN sama dengan tahun anggaran 2023 yakni WTP, sesuai dengan target pada Renstra Sestama dan Renstra BKN. Upaya yang akan dilakukan agar Badan Kepegawaian Negara tetap mempertahankan opini WTP dari BPK adalah:

1. Melaksanakan pembinaan berkala kepada satuan kerja di Badan Kepegawaian Negara;
2. Koordinasi pada satuan kerja dan unit kerja secara intensif dengan melaksanakan bimbingan teknis maupun pembinaan secara langsung;
3. Monitoring secara berkala dilakukan agar diketahui progress dari kendala serta permasalahan yang dialami oleh satuan kerja maupun unit kerja di Badan Kepegawaian Negara

IKU 8. Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
87,84	91,74	92,65	90,88	-	88	93	Rp535.812.000,-

Tabel 3.9 Rencana Target IKU 8. Nilai Predikat IKPA Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Dalam usaha untuk mencapai kualitas belanja Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) yang tinggi, dengan mempercepat belanja dan meraih hasil melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk memberikan penilaian IKPA yang lebih transparan dan akuntabel, terjadi perubahan dalam regulasi yang mengatur panduan teknis penilaian IKPA pada tahun 2022. Perubahan ini dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor PER-5/PB/2022 tentang Panduan Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021. Meskipun demikian, penilaian IKPA pada tahun 2024 masih merujuk pada peraturan tersebut sebagai pedoman penilaian.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai untuk mengevaluasi kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau Lembaga, dengan fokus pada implementasi dan hasil perencanaan anggaran. Pengukuran IKPA mencakup tiga aspek, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Elemen-elemen yang memengaruhi nilai IKPA, sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, melibatkan:

1. Revisi DIPA, yang mengukur kemampuan melakukan revisi dengan efektif.
2. Deviasi Halaman III DIPA, yang menekankan pada perhitungan rencana penarikan dana yang akurat, sebagai dasar perkiraan pencairan dana harian.
3. Penyerapan Anggaran, mengevaluasi pelaksanaan anggaran sesuai target dengan proporsionalitas yang diinginkan.
4. Belanja Kontraktual, mengukur kecepatan pengiriman data kontrak, dengan batas waktu maksimal 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak.
5. Penyelesaian Tagihan, mengamati kepatuhan waktu dalam menyelesaikan tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, dengan batasan maksimal 17 hari kerja.
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), yang menekankan pada revolusi UP setidaknya satu bulan sekali dan pertanggungjawaban TUP sesuai dengan surat pernyataan.
7. Dispensasi SPM, dengan usaha untuk menghindari penggunaan dispensasi SPM.
8. Konfirmasi Capaian Output, yang harus disampaikan dalam waktu 10 hari kerja bulan berikutnya.

$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$			
No.	Indikator	Bobot 2021	Rencana Bobot 2022
1.	Revisi DIPA	5%	10%
2.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	10%
3.	Penyerapan Anggaran	15%	20%
4.	Data Kontrak	10%	10%
5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	8%	10%
7.	Dispensasi SPM	5%	5%
8.	Capaian Output	17%	25%
9.	LPJ Bendahara	5%	-
10.	Renkas	5%	-
11.	Kesalahan SPM	5%	-
12.	Retur SP2D	5%	-
13.	Pagu Minus	5%	-
TOTAL		100%	100%



Tabel 3.10 Formula dan Bobot Nilai IKPA
 Sumber : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022

Pada tahun 2023, terdapat indikator yang mengalami kendala selama proses pencapaian nilai maksimal di tahun 2023. Perolehan nilai IKPA BKN BA 088 dari tahun 2021 s.d. 2023 mengalami tren polinom, yaitu menurun pada akhir tahun 2023. Dari nilai 91.74 di tahun 2021 naik menjadi 92.65 di tahun 2022, dan turun menjadi 90.88 di tahun 2023. Antara lain, rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap jenis belanja yang tercermin pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, masih memerlukan peningkatan. BKN masih mendapat nilai 62.54 (nilai 6.24 dari bobot maksimal 10), dengan kata lain indikator Deviasi Halaman III DIPA, masih menjadi indikator yang perlu menjadi perhatian di beberapa Satuan Kerja. Rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada setiap jenis belanja masih perlu mendapat perhatian di setiap Satuan Kerja di BKN. Pencapaian nilai-nilai pada kurun waktu 2020 s.d. akhir 2023 menyebabkan target pada tahun 2024 memiliki perbedaan dengan nilai dari Renstra Sestama, walaupun demikian, target masih tetap dengan nilai 93 sama seperti target pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2023 target IKU Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA) belum tercapai 100%.

Pada tahun 2024, pencapaian nilai-nilai IKPA pada kurun waktu 2020 s.d. akhir 2023 menyebabkan target pada tahun 2024 memiliki perbedaan dengan nilai dari Renstra Sestama, walaupun demikian, target pada tahun 2024 masih tetap dengan nilai 93 sama seperti target pada tahun 2023. Sekretariat Utama BKN berusaha untuk memaksimalkan langkah- langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BKN. Antara lain dengan melakukan koordinasi, komunikasi, dan pembinaan berkala baik satuan kerja BKN Kantor Pusat, Kantor Regional (14 Kantor Regional) dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

SS.5 Terwujudnya hubungan Masyarakat yang efektif

IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	N/A	N/A	81,8	N/A	95	94	Rp182.800.000,-

Tabel 3.11 Rencana Target IKU 9. Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Maksud dan tujuan dari dilakukannya Pengelolaan Media Publikasi adalah untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari diseminasi informasi yang dilakukan oleh BKN dalam hal ini Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama. Pengelolaan dilakukan dengan melakukan penghitungan jumlah informasi yang di diseminasikan, rerata jangkauan dan keterikatan yang dapat langsung terlihat melalui analisis masing-masing media yang dikelola. Dari masing-masing analisis tersebut akan dapat mengetahui informasi tersebut termasuk yang dibutuhkan atau tidak bagi masyarakat. Selain itu dari analisis tersebut akan dilanjutkan dengan pencarian penerimaan atau respons dari audience atau dalam target disampaikan trend pemberitaan bernilai positif.

Penerimaan audience yang bernilai positif juga akan berpengaruh pada citra baik yang diperoleh oleh BKN.

Pada tahun 2023, capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN sebesar 81,8% dari target 94%. terjadinya hal tersebut bukan dikarenakan jangkauan yang kurang baik dalam setahun publikasi kegiatan BKN, akan tetapi adanya ketimpangan hasil perhitungan per triwulan. pada saat adanya pemberitaan mengenai CASN, maka reach yang dicapai bisa melonjak naik sangat tinggi. melonjaknya angka pada periode tersebut akan membuat persentase capaian rerata tidak stabil.

Pada Tahun 2024, target capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN adalah 94, sama dengan target pada tahun sebelumnya. perhitungan telah diubah mempertimbangkan ketidakstabilan jangkauan media yang dapat mempengaruhi rerata jangkauannya. Untuk itu, pada tahun ini formula capaian rerata adalah jumlah jangkauan masing masing media dibagi jumlah media sosial yang dikelola, kemudian dikali 100%. diharapkan dengan perhitungan yang baru ini akan mendorong persentase capaian rerata jangkauan media mengingat pada tahun ini pemberitaan mengenai CASN akan sangat mempengaruhi persentase jangkauan media BKN.

IKU telah mengalami tiga kali perubahan. pada 2021 narasi IKU adalah persentase pemberitaan yang baik tentang BKN di media massa (TV, Cetak dan Online). kemudian berubah pada PK 2022 menjadi persentase pemberitaan yang baik di media online. perubahan tersebut terjadi akibat dari dihilangkannya media cetak karena tools monitoring BHHK tidak bisa memonitoring media cetak. kemudian pada PK 2023, IKU berubah lagi menjadi persentase capaian rerata jangkauan publikasi per media BKN. perubahan tersebut akibat dari tidak adanya tools monitoring media yang dapat menentukan pemberitaan bersifat positif atau negatif terkait BKN. perubahan tersebut dilakukan untuk menghindari penilaian subjektif dari pengelola media di BHHK dikarenakan pelaksanaannya yang masih manual, sehingga dilakukan perubahan dasar dengan menggunakan data real yang dapat diukur dengan menggunakan analisis media sosial.

IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
69,12	73,13	90,93	90,19	N/A	N/A	91	Rp104.175.000,-

Tabel 3.12 Rencana Target IKU 10. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Pada tahun 2023 target pada indikator Nilai keterbukaan informasi publik ditetapkan dalam kategori Informatif dengan nilai 91, pencapaian yang didapatkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023 menetapkan Badan Kepegawaian

Negara dalam kategori Informatif dengan nilai 90.19 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. nilai keterbukaan informasi publik mengalami penurunan sebesar 0.74 poin dibandingkan dengan nilai keterbukaan informasi publik tahun 2022. ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai tersebut turun, yaitu Kurangnya koordinasi terkait dengan pemenuhan dokumen pengadaan barang dan jasa antar unit kerja, Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan Terdapat perubahan sistem pembobotan penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023, dimana pembobotan nilai didasarkan pada pemenuhan kuesioner money keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024, target IKU yang ingin dicapai masih di angka 91. walaupun realisasi tahun 2023 tidak tercapai, tetapi perbedaan tidak signifikan. untuk itu, BKN akan lebih memperhatikan lagi mengenai indikator yang menjadi kriteria seperti indikator indikator pengumuman 5 paket tertinggi pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam LPSE yang menjadi faktor turunnya nilai indeks keterbukaan informasi publik BKN. rapat koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi juga akan diselenggarakan dengan Kantor Regional BKN serta unit-unit teknis yang menyusun produk informasi agar sebaiknya memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dokumen terkait kepada tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Badan Kepegawaian Negara.

SS.6 Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama IKU.11 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
81,49	84,01	85,67	87,88	95	95	95	Rp55.525.000,-

Tabel 3.13 Rencana Target IKU 11. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Pengukuran indeks kepuasan menggunakan metode survei berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan *stakeholder* sebagai pengguna layanan Sekretariat Utama, pengukuran ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melaksanakan survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut adalah nilai kepuasan layanan per Biro di Lingkungan Sekretariat Utama.

Berdasarkan nilai indeks kepuasan yang diperoleh oleh masing-masing Biro, maka Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama adalah 87.88 dari target 88 pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama.

Pada tahun 2024, target yang disepakati adalah 95. nilai tersebut sejalan dengan renstra BKN dan juga Sestama. walaupun realisasi tahun lalu tidak mencapai target, diharapkan pada tahun ini realisasinya dapat tercapai/melampaui target pada IKU. Sekretariat Utama yang terdiri dari 5 biro terus berkomitmen secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan peningkatan layanan kesekretariatan dalam rangka memenuhi ekspektasi stakeholder sekretariat utama. Setiap Biro akan terus meninjau standar pelayanan yang diberikan dan melakukan koordinasi dan menanggapi *feedback* dari unit kerja BKN pusat, BKN regional dan UPT.

SS.7 Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi IKU.12 Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kompetensinya

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
80%	91%	93%	N/A	N/A	95%	95%	Rp838.075.000,-

Tabel 3.14 Rencana Target IKU 12. Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Realisasi yang dicapai untuk IKU Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kompetensinya pada Tahun 2022 adalah sebesar 93% sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, sampai dengan TW III Tahun 2023, belum didapat capaian akhir dari IKU ini. Dalam mengukur capaian indikator penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, digunakan data yang diperoleh dari Sistem Manajemen Talenta BKN, dimana Manajemen Talenta merupakan aktivitas terintegrasi dalam mengelola SDM melalui proses mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, mempertahankan dan menyebarkan orang-orang bertalenta tinggi ke dalam suatu jabatan di organisasi secara tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki individu tersebut.

Manajemen Talenta wajib diselenggarakan oleh instansi dalam mendukung pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan prioritas Pembangunan Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, tahapan penyelenggaraan Manajemen Talenta meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta serta pemantauan dan evaluasi talenta.

Untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta di lingkungan BKN, sampai dengan TW III Tahun 2023, telah disahkan SE Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Manajemen Talenta yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penerapan Manajemen Talenta di lingkungan BKN. Pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan BKN sendiri

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Talenta (MATA ASN BKN) yang dikembangkan pada Tahun 2022 dan berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelola, mempertahankan dan mengembangkan pegawai-pegawai agar didapatkan talenta-talenta terbaik yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi.

Dalam melakukan perhitungan Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kompetensi menggunakan Sistem Manajemen Talenta, mulai pada Tahun 2022 telah disusun *milestone* setiap tahunnya untuk kluster pegawai yang diidentifikasi, yaitu pada Tahun 2022 dilakukan perhitungan untuk Jabatan JFT Madya dan Administrator, Tahun 2023 untuk Jabatan JFT Muda dan Pengawas, sedangkan Tahun 2024 untuk JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama, JFT Pertama, JF Keterampilan dan JF Pelaksana. Perhitungan menggunakan MATA ASN BKN dilakukan berdasarkan indikator XYZ dengan komponen berikut:

1. Sumbu X, merupakan nilai Potensi (Hasil Pemetaan Pegawai);
2. Sumbu Y, merupakan nilai Kinerja yang terdiri dari hasil Penilaian Kinerja satu tahun terakhir dan Kompleksitas Pekerjaan;
3. Sumbu Z, merupakan nilai Kompetensi yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
 - b. Kompetensi Teknis: Rekam Jejak, Pelatihan Non Klasikal (CMB) Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis;
 - c. Kualifikasi: Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Penghargaan, Hukuman Disiplin dan Pelatihan Kepemimpinan.

Pada Tahun 2024, target yang ingin dicapai adalah sebesar 95% sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Penetapan target tersebut, selain karena menyesuaikan dengan target yang ada pada Rencana Strategis Sekretariat Utama, Sistem Manajemen Talenta diyakini menjadi *tools* yang dapat membantu dalam pencapaian target Tahun 2024. Jika pada Tahun 2023, formula untuk IKU ini adalah dengan menghitung kesesuaian pada kluster pegawai di Jabatan JFT Muda dan Pengawas, untuk Tahun 2024 jenis jabatan yang diidentifikasi lebih banyak yakni JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama, JFT Pertama, JF Keterampilan dan JF Pelaksana.

Terdapat beberapa upaya untuk mendukung tercapainya target IKU Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kompetensinya yang akan dilakukan pada Tahun 2024, diantaranya adalah penyempurnaan Sistem Manajemen Talenta, Membuat pedoman penyusunan Pola Karier, dan Mengimplementasikan pengukuran *Job Fit* untuk setiap seleksi baik dalam proses rekrutmen CPNS maupun dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

SS.8 Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN
IKU.13 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	Rp307.495.000,-

Tabel 3.15 Rencana Target IKU 13. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General BKN Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Terdapat perubahan nomenklatur Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Roadmap RB per Tahun. Program kegiatan RB di BKN tahun 2024 dilaksanakan dengan mendasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map RB 2020-2024 yang telah disusun kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disusun oleh setiap kelompok kerja area perubahan. Berdasarkan hal tersebut tingkat pelaksanaan RATL RB pada tahun 2023 sudah tercapai 100%. Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pada IKU ini, pada tahun 2024 salah satu kegiatan yang direncanakan adalah terselenggaranya review roadmap RB BKN.

IKU.14 Indeks Pengelolaan Aset

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	3.01	3.14	N/A	N/A	N/A	3.50	Rp73.258.602.000,-

Tabel 3.16 Rencana Target IKU 14. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Aset diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, sejak tahun 2023 Sekretariat Utama secara resmi menggunakan Indeks Pengelolaan Aset sebagai acuan penilaian kualitas pengelolaan aset

yang ada di BKN. Pada tahun 2021, BKN berhasil mendapat penilaian 3.01 lalu meningkat penilaiannya pada tahun 2022 yaitu 3.14.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/KM.6/2022 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) terdiri dari 4 Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif
 - a. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP terkait BMN pada K/L (5%);
 - b. Realisasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Pengelolaan Aset (15%);
2. Sasaran Strategis II : Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - a. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) (10%);
 - b. Asuransi BMN (15%);
3. Sasaran Strategis III : Pengawasan Pengendalian yang Efektif
 - a. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (15%);
 - b. Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (15%);
4. Sasaran Strategis IV : Administrasi BMN yang Handal
 - a. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%);
 - b. Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (10%).

Adapun target yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 3.50, dimana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Kepegawaian Negara. Hal ini menjadi tantangan dengan peningkatan target sejalan dengan peningkatan pembangunan UPT melalui skema SBSN.

IKU.15 Indeks Tata Kelola PBJ

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	68.11	80.6	83.2	N/A	N/A	84	Rp250.000.000,-

Tabel 3.17 Rencana Target IKU 15 Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP. Indeks tata kelola PBJ terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu

sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. *E-Kontrak*.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Berdasarkan hal tersebut maka di Lingkup Sekretariat Utama sejak tahun 2023 sudah mengubahnya menjadi “Indeks Tata Kelola PBJ” yang sebelumnya pada tahun 2022 berupa “Persentase Paket yang Dilaksanakan Melalui Aplikasi SPSE 43” dengan pertimbangan lingkup yang lebih luas terkait dengan cakupan kinerja terkait dengan pengadaan barang/jasa. Tidak hanya terpaku pada paket yang terlaksana saja namun perspektif yang lebih luas di dalam ITKP karena memasukkan poin sumber daya manusia serta kematangan unit pengelolaan yaitu UKPBJ.

Tahun 2022, BKN mendapatkan nilai 80.6. Kemudian berdasarkan penilaian ITKP pada triwulan 3 tahun 2023 nilai ITKP meningkat menjadi 83.2. Peningkatan nilai tersebut berdasarkan peningkatan dari hasil penilaian SiRUP dari 8.4 menjadi 10 karena RUP sudah diunggah pada SPSE sebelum tanggal 31 Maret. Berdasarkan data tersebut, maka target pada tahun 2024 yang ingin dicapai adalah 84. Tantangan peningkatan target tersebut dapat dioptimalkan dengan peningkatan aspek-aspek penilaian LKPP terutama pemanfaatan katalog sektoral elektronik BKN.

IKU.16 Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
61.3	60.4	72.3	78.4	N/A	N/A	80	Rp250.000.000,-

Tabel 3.18 Nilai Rencana Target IKU 16 Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Realisasi hasil audit kearsipan dari ANRI Tahun 2022 memperoleh nilai 72.3. Terdapat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2021 dengan nilai 60.4. Peningkatan tersebut disebabkan adanya komitmen dalam melakukan berbagai perbaikan

terutama pada aspek-aspek penilaian dalam audit kearsipan. Hingga triwulan 3 pada tahun 2023, BKN mendapatkan nilai 78.4. Peningkatan nilai tersebut menjadi dasar penetapan target di tahun 2024 sebesar 80.

Tambahan sumber daya manusia di bidang kearsipan pada tahun 2022-2023 sangat membantu dalam implementasi berbagai kebijakan strategis terkait kearsipan. Keseriusan unit-unit di baik di BKN Pusat maupun Kantor Regional I-XIV juga antusias dalam pembenahan arsip. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip baik arsip aktif maupun arsip inaktif juga mendorong perbaikan dari berbagai sisi kearsipan. Pada tahun 2024 akan ada beberapa proyek terkait kearsipan yang diharapkan mampu mendongkrak penilaian antara lain penyiapan ruang record center, alih media arsip inaktif, serta penataan arsip inaktif dalam rangka persiapan perpindahan IKN.

SS.9 Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel
IKU.17 Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	75	Rp331.020.000,-

Tabel 3.19 Nilai Rencana Target IKU 17. Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

IKU Renstra Sekretariat Utama periode 2020-2024 terdapat IKU “Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan” pada Sasaran Strategis “Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel”. Di tahun 2020 dan 2021 IKU tersebut telah tercapai dengan capaian 100% selama dua tahun. Oleh karenanya IKU Renstra ini tidak lagi dimunculkan pada tahun 2022. Namun dimunculkan kembali pada IKU Perjanjian Kerja Sekretariat Utama di tahun 2023 dengan nama IKU “Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088” dikarenakan IKU Renstra Sekretariat Utama harus tetap memunculkan output. Dalam prosesnya, menurut rekomendasi LHE Inspektorat 2023 Nomor 055/AI.03/LHE/H/2023, perhitungan dalam IKU tersebut dirasa belum *measurable* karena formulasi di manual IKU tahun 2023 tidak terdapat mekanisme pengukuran dengan output persentase. Oleh karenanya, pada tahun 2024, sesuai dengan rekomendasi dari LHE mengenai catatan hasil reviu dari Inspektorat yang harus ditindaklanjuti, serta mengingat bahwa tindak lanjut dari catatan hasil reviu juga berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan BA 088. Maka dari itu IKU tersebut berubah narasi menjadi “Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat”.

Secara umum peraturan mengenai IKU ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pergantian IKU Nomor 17 pada Sasaran Strategis Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel, yang semula IKU Nomor 17 berbunyi “Kualitas Laporan Keuangan BA 088” dengan rumus penghitungan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan diubah menjadi “Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat”.

Berikut terlampir dasar simulasi perhitungan target IKU “Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan BA 088 dari Inspektorat” untuk tahun 2024 yang menjadi dasar penetapan target untuk tahun 2024;

No	Dasar Tindak Lanjut LHR LK	Penyelesaian/ Perbaikan sesuai Rekomendasi	Penyelesaian/ Perbaikan tidak sesuai Rekomendasi	Jumlah Hasil Reviu	Persentase	
					Sesuai	Tidak Sesuai
1	LHR atas LK Semester I TA 2022					
	<i>Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</i>					
	a. Kesalahan penggunaan akun (MAK)	5	5	10	50.00%	50.00%
	b. Perbedaan data Rekon antara SPAN dengan SAKTI	2	-	2	100.00%	0.00%
	<i>Reviu atas NERACA</i>					
	a. Aset Lancar	4	1	5	80.00%	20.00%
	b. Aset Tetap	9	3	12	75.00%	25.00%
	c. KDP	4	-	4	100.00%	0.00%
	d. Aset Lainnya	2	2	4	50.00%	50.00%
	e. Kewajiban	1	-	1	100.00%	0.00%
	f. Ekuitas	1	-	1	100.00%	0.00%
	<i>Reviu atas Laporan Operasional (LO)</i>					
	a. Perbedaan nilai pada aplikasi	2	-	2	100.00%	0.00%
	b. Kesalahan penginputan kodifikasi barang	3	-	3	100.00%	0.00%
Jumlah	33	11	44	75.00%	25.00%	
2	LHR atas LK Triwulan III TA 2022					
	<i>Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</i>					
	a. Kesalahan penggunaan akun (MAK)	7	5	12	58.33%	41.67%
	<i>Reviu atas NERACA</i>					
	a. Aset Lancar	4	-	4	100.00%	0.00%
	b. Aset Tetap	4	1	5	80.00%	20.00%
	c. KDP	2	-	2	100.00%	0.00%
	d. Aset Tetap Lainnya	1	1	2	50.00%	50.00%
	<i>Reviu atas Laporan Operasional (LO)</i>					
	a. Kesalahan penginputan kodifikasi barang	4	-	4	100.00%	0.00%
Jumlah	22	7	29	75.86%	24.14%	
3	LHR atas LK Semester I TA 2023					
	<i>Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</i>					
	a. Kesalahan penginputan kodifikasi barang	5	-	5	100.00%	0.00%
	b. Kesalahan penggunaan akun (MAK)	5	6	11	45.45%	54.55%
	<i>Reviu atas NERACA</i>					
	a. Aset Lancar	8	-	8	100.00%	0.00%
	b. Aset Tetap	7	3	10	70.00%	30.00%
	c. Aset Tetap Lainnya	-	1	1	0.00%	100.00%
	<i>Reviu atas Laporan Operasional (LO)</i>					
	a. Kesalahan pencatatan nilai pendapatan	3	1	4	75.00%	25.00%
	b. Kesalahan pencatatan nilai beban persediaan	1	-	1	100.00%	0.00%
<i>Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</i>						
a. Selisih pencatatan transaksi TK/TM	1	-	1	100.00%	0.00%	
Jumlah	30	11	41	73.17%	26.83%	
Rata-rata (sebagai dasar target Iku 17 2024)					75%	

Tabel 3.20 Dasar Simulasi Perhitungan Target IKU
Sumber : LKJ SETTAMA BKN Tahun 2023

**SS.10 Terlaksananya pengembangan dan pembinaan Kerjasama bidang Manajemen ASN
IKU.18 Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati**

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
94%	85%	94,25%	83%	N/A	92%	95%	Rp303.801.000,-

Tabel 3.21 Rencana Target IKU 18 Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara. Mitra kerja sama Badan Kepegawaian negara terdiri atas mitra kerja sama dalam negeri dan luar negeri. Indikator persentase dokumen kerja sama yang disepakati bertujuan untuk mengukur seberapa banyak kerja sama yang dilaksanakan per tahunnya baik dalam bentuk kerja sama dalam dan luar negeri. Dokumen kerja sama yang berhasil disepakati pada tahun 2023 sejumlah 96 dokumen kerja sama yang terdiri dari 41 dokumen kerja sama dalam negeri dan 55 dokumen kerja sama luar negeri. Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan kerja sama dengan berbagai institusi untuk mendukung tercapainya target kinerja. Instansi tersebut terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, BUMN, BUMD. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara juga bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi internasional, dan lembaga lainnya di luar negeri yang berbadan hukum dan Pengelolaan kerja sama antar lembaga di lingkungan BKN dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama dan di *cascading* pada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama.

PK pada tahun 2024 adalah sebesar 95%, lebih dari targetnya dari renstra sestama sebesar 92%. alasan penetapan tersebut karena realisasi pada tahun 2022 adalah 94,25% sehingga disamakan dengan target tahun sebelumnya.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yaitu kurangnya minat peserta untuk mendaftar pelatihan/workshop, beberapa peserta belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan sertifikat yang memadai. Untuk meningkatkan persentase jumlah dokumen kerja sama yang disepakati pada tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama akan menindaklanjuti pembangunan Aplikasi Kerja Sama (SIKERMA) hingga sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis kerja sama dalam dan luar negeri. Melihat capaian realisasi pada tahun 2022, kami optimis bahwa pada tahun ini akan dapat merealisasikan target sebesar 95%

SS.11 Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan Lembaga yang optimal

IKU.19 Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
98,2	93	96	93	N/A	96	98,3	Rp115.499.995,-

Tabel 3.22 Rencana Target IKU 19 Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Badan Kepegawaian Negara menggunakan beberapa Media dalam mensosialisasikan program dan kegiatannya dalam setahun. Adapun media yang digunakan untuk publikasi diantaranya facebook, twitter, instagram, tiktok, youtube, dan website. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya diukur melalui jumlah program dan kegiatan BKN yang telah didesiminasikan melalui media sosial BKN.

Pada tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama mendiseminasikan program dan kegiatan BKN sejumlah 1.610 unggahan. Realisasi persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya pada tahun 2023 yaitu sebesar 93% dari target 98,3% yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Sekretaris Utama. Belum tercapainya iku ini disebabkan oleh belum optimalnya tim publikasi untuk mengunggah konten pada media sosial yang telah disepakati.

Pada tahun 2024, target yang akan dicapai sebesar 98,3, lebih tinggi dari renstra sestama. hal tersebut karena pada realisasi pada 2020 telah melewati target renstra sestama, yaitu sebesar 98,2. Untuk meningkatkan persentase jumlah publikasi, maka akan dilakukan monitoring unggahan konten secara reguler, penyusunan strategi komunikasi dan agenda setting pada tahun 2024.

**SS.12 Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten
IKU.20 Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN**

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
67,77	76,13	74,12	N/A	N/A	82	82	

Tabel 3.23 Rencana Target IKU 20. Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Pada Tahun 2022, realisasi yang dicapai pada IKU Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN adalah sebesar 74,12 dimana perhitungan data pada Tahun 2021 digunakan sebagai dasar capaian Indeks Profesionalitas ASN Settama pada Tahun 2022. Kemudian, untuk capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat Utama baru akan keluar hasilnya pada Triwulan IV Tahun 2023.

Target yang ingin dicapai untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama pada Tahun 2024 adalah 82. Target tersebut sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Sekretariat Utama di tahun 2024, maka Sekretariat Utama akan mengupayakan untuk dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah dengan terus melaksanakan kegiatan *Coaching*, *Mentoring*, Belajar Mandiri serta kegiatan Komunitas Belajar sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup Sekretariat Utama. Selain itu, akan diadakan pelatihan teknis yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui sinergi dengan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dan juga akan diadakan seminar, webinar dan juga bimtek di setiap unit kerja di lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya agar seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Utama dapat memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP tiap tahunnya.

SS.13 Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses

IKU.21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
100	100	100	N/A	N/A	100	100	-

Tabel 3.24 Rencana Target IKU 21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Sekretaris Utama Tahun 2024
 Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Saat ini seluruh kegiatan dalam pemerintahan baik untuk layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan sedang disusun dengan mempertimbangkan ketentuan dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemanfaatan sistem informasi yang terstandar memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar unit kerja dalam melaksanakan urusan dan tugas untuk mencapai tujuan bersama.

Target di tahun 2024 adalah seluruh aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan maksimal oleh seluruh pegawai sesuai dengan tujuan dan ketentuan masing-masing aplikasi. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan penggunaan Sistem Informasi yang handal adalah dengan sosialisasi secara berkala dan *maintenance* rutin sistem aplikasinya sehingga minim terjadi kerusakan atau *error* saat digunakan.

SS.14 Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

IKU.22 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Sekretaris Utama

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
N/A	N/A	N/A	N/A	36	36	100%	-

Tabel 3.25 Rencana Target IKU 22 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Settama Tahun 2024
 Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Terbitnya Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 yang membawa dampak terhadap perubahan pelaksanaan RB sebagaimana telah disinggung pada IKU 16 sebelumnya juga membawa dampak dalam pelaksanaan IKU 22 ini. Perubahan regulasi tersebut membawa dampak pada pelaksanaan evaluasi RB yang pada tahun - tahun sebelumnya ada penilaian mandiri di tingkat Eselon I, untuk tahun 2023 penilaian tersebut sudah tidak dilaksanakan sehingga target IKU yang tercantum dalam PK yang sudah ditandatangani tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Berdasarkan hal tersebut, IKU 22 diubah dari yang semula “*Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN*” diubah menjadi “*Persentase pelaksanaan rencana aksi RB Settama BKN*” dengan target 100% dan diturunkan pada setiap unit kerja Eselon II.

IKU.23 Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Sekretariat Utama Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
71,96	73,95	72,55	68,35	N/A	83	80	Rp141.875.000,-

Tabel 3.26 Rencana Target IKU 23 Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Settama BKN Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Sesuai dengan Asas Akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dalam rangka menjalankan Asas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP di lingkup BKN dilaksanakan penilaiannya oleh Inspektorat dan dilakukan terhadap unit setingkat Eselon I. Sekretaris Utama BKN sebagai unit setingkat Eselon I di BKN juga telah dievaluasi pelaksanaan AKIP Tahun 2023 oleh inspektorat yang hasil evaluasinya dapat dilihat pada Laporan Nomor Laporan Nomor 055/AI.03/LHE/H/2023 tanggal 4 September 2023.

Berdasarkan penilaian tersebut, terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan AKIP di lingkup Settama. Salah satunya adalah terkait adanya target di renstra yang dinilai tidak *achievable*. Sebagai upaya tindak lanjut, unit kerja di lingkup Sekretariat Utama melakukan review atas target yang ada dalam renstra, hasilnya adalah terdapat perubahan target indikator kinerja (IKU) pada tahun 2023, termasuk perubahan target dalam IKU ini yang semula 85 (sama dengan Renstra) menjadi 80.

1. Melakukan review Renstra Sekretariat Utama 2020 - 2024 sebagai dasar penyusunan Renstra Sekretariat Utama periode 2025 -2029;
2. Memastikan dokumen perencanaan kinerja terpenuhi dengan baik, melakukan review dan

- perbaikan pada dokumen Manual IKU, Renja, Penetapan Target IKU, dan Rencana Aksi serta memperhatikan kesesuaiannya dengan Renstra dan PK
4. Menertibkan administrasi dokumen pendukung kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di lingkup Sekretariat Utama;
 5. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan analisis secara mendalam atas setiap capaian indikator kinerja, terutama perlunya penjelasan mengenai hambatan dalam realisasi capaian indikator kinerja dan penjelasan mengenai rekomendasi perbaikannya;
 6. Penyusunan dokumen Laporan Kinerja harus dilengkapi dengan data yang andal sesuai dengan formula yang tercantum dalam dokumen manual IKU, serta membuat Laporan Kinerja dengan analisis yang mendalam agar dapat dijadikan bahan/informasi dalam proses penyusunan perencanaan kinerja;
 7. Pemanfaatan Google Data Studio (aplikasi MAKO) dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan data dan dokumen pendukung kinerja organisasi perlu ditingkatkan fitur dan kualitasnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan disusunnya sistem informasi yang dapat mengakomodir proses pelaksanaan SAKIP di lingkup BKN.

**SS.15 Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel
IKU.24 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Utama**

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
98,86%	90,58%	97,68%	97,61%	100%	100%	100%	Rp407.000.372.008,-

Tabel 3.27 Rencana Target IKU 24 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2024
Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Settama BKN mengukur sejauh mana realisasi anggaran dan pencapaian fisik di Sekretariat Utama, dengan membandingkan rencana anggaran dan pencapaian fisik yang telah diatur. Perubahan narasi IKU dari Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Settama BKN di tahun 2023 menjadi Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Utama di tahun 2024 adalah karena agar tidak bermakna ganda dan memenuhi prinsip SMART-C, yaitu *specific*.

Pada tahun 2023, Sekretariat Utama diberikan pagu anggaran awal sebesar Rp262.581.684.000, yang dialokasikan untuk mendanai 1 Program dan 4 Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Sekretariat Utama BKN. Untuk tahun 2023, target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di wilayah Settama BKN ditetapkan sebesar 100% dan hanya dapat terealisasi sebesar 97.61% atau

sebesar Rp328.556.206.919 dari pagu anggaran final sebesar Rp336.592.072.000. Adapun kendala dalam penyerapan anggaran T.A. 2023, terutama terkait dengan belanja pegawai, dikarenakan antara lain yakni formasi PPPK yang tidak terisi semua, sehingga pembayaran gaji tidak bisa terserap dengan optimal. Pegawai PPPK tahun 2023 yang dianggarkan untuk dibayarkan belanja pegawai di Januari 2023 baru dibayarkan per Agustus 2023 (19 orang) dan November 2023 (10 orang) sesuai TMT Perjanjian Kerja PPPK. Kemudian, Tunjangan Jabatan Auditor Manajemen ASN yang belum dapat dibayarkan karena Perpres terkait belum terbit. Pentingnya evaluasi rutin dan penyesuaian perencanaan diharapkan dapat memastikan pengalokasian kelebihan anggaran dengan lebih efektif di masa mendatang

Pada tahun 2024, Sekretariat Utama diberikan pagu anggaran awal sebesar Rp406.820.372.000,

IKU.25 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Realisasi				Target 2024			Anggaran 2024
2020	2021	2022	s.d Tw III 2023	Renstra BKN	Renstra Sestama	Renja Sestama	
100%	100%	50%	52%	-	100%	100%	Rp90.000.000,-

Tabel 3.28 Rencana Target IKU 25 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat Tahun 2024

Sumber: Renstra dan Laporan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

Indikator ini untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban atas temuan hasil pemeriksaan/audit terhadap laporan pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama. Pertanggungjawaban atas temuan hasil pemeriksaan diwujudkan dengan tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Tujuannya adalah kepatuhan unit atas tindak lanjut atau rekomendasi BPK/Inspektorat.

No	Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status				Persentase Sesuai
			Sesuai	Pengajuan Sesuai	Belum Sesuai	Belum DiTL	
1	Biro Perencanaan dan Organisasi	3	3	0	0	0	100%
2	Biro Keuangan	7	1	0	1	5	14%
3	Biro Sumber Daya Manusia	2	0	0	2	0	0%
4	Biro Umum	7	4	0	0	3	57%
5	Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama	4	4	0	0	0	100%
	Total	23	12	0	3	8	52%

Berikut status Tindak Lanjut sampai dengan Semester II TA 2023:

Pada Tahun 2024, pada Sekretariat Utama terdapat total 23 Rekomendasi, yakni 12 (dua belas)

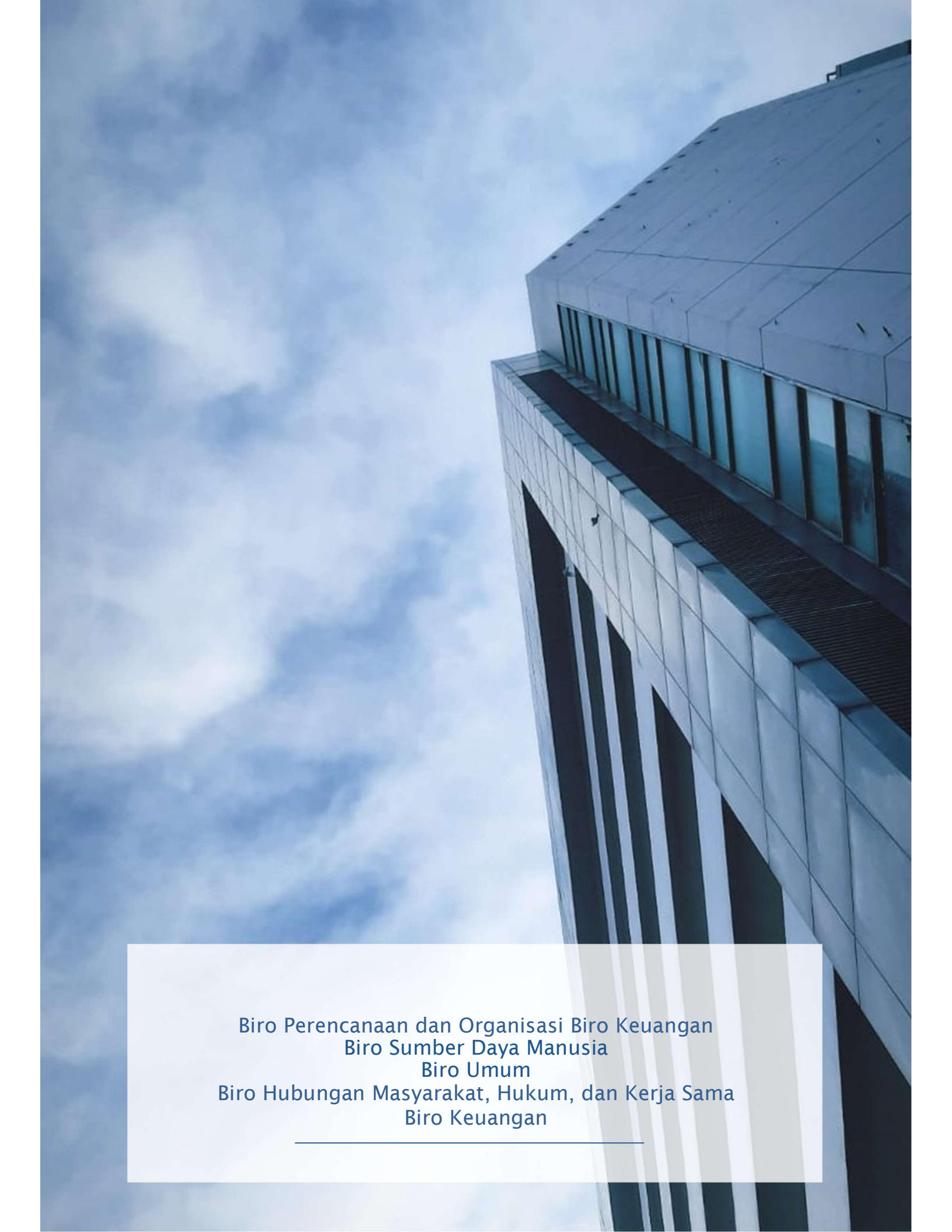
Tindak Lanjut yang telah Sesuai, 3 (tiga) Tindak Lanjut yang Belum Sesuai, dan 8 (delapan) Tindak Lanjut yang belum ditindaklanjuti. Pada tahun 2024, ditargetkan agar dapat ditindaklanjuti semua rekomendasi sehingga target di tahun 2024 adalah 100%.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Tahun 2020-2024, perubahan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 ini merupakan acuan bagi unit eselon II mandiri di bawah lingkup Sekretaris Utama dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

LAMPIRAN



Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Keuangan
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
Biro Keuangan

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA 4842 4842.EBA	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan SDM Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			4,355,335,000 804,545,000 366,650,000	
4842.EBA.960 052 A	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pelaksanaan PENATAAN KELEMBAGAAN	1.0 Layanan		366,650,000 366,650,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x 3KEGX1KL - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x3 KEG X 2KL	150.0 OK 300.0 OK	53,000 24,000	7,950,000 7,200,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.088-Jakarta III) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 1 org x 2 jam - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam	2.0 OJ 2.0 OJ	1,000,000 900,000	2,000,000 1,800,000	RM
B	PENYUSUNAN PERBAN OTK BKN			164,280,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x 2KEGX1KL - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x2KEG X 2KL	100.0 OK 200.0 OK	53,000 24,000	5,300,000 4,800,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.088-Jakarta III) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 1 org x 2 jam - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam	2.0 OJ 2.0 OJ	1,000,000 900,000	2,000,000 1,800,000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.088-Jakarta III) - Paket Meeting Fullboard Eselon I dan II - Paket Meeting Fullboard eselon III dibawah - Biaya perjalanan dinas dan uang saku	1.0 PAKET 1.0 PAKET 1.0 PAKET	57,720,000 24,660,000 68,000,000	57,720,000 24,660,000 68,000,000	RM
C	PENATAAN JABATAN			107,730,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x 1KEGX1KL - Perjalanan dinas dalam rangka pemetaan jabatan - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x1 KEG X 1KL	50.0 OK 1.0 PAKET 50.0 OK	53,000 96,830,000 24,000	2,650,000 96,830,000 1,200,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi - Pulang (PP) DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 8JAM	1.0 PAKET	7,050,000	7,050,000	RM
<i>D</i>	<u>MONITORING INDEKS SPBE</u>			3,080,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) > Jamuan rapat biasa dan bimtek spbe - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 20 ORG x2KEG X 1KL - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 20 ORG x 2KEGX1KL	40.0 OK 40.0 OK	24,000 53,000	960,000 2,120,000	RM
<i>E</i>	<u>INDEKS REFORMASI HUKUM</u>			7,650,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) > Jamuan rapat biasa dan bimtek spbe - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 25 ORG x2KEG X 1KL - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 25 ORG x 2KEGX1KL	50.0 OK 50.0 OK	24,000 53,000	1,200,000 2,650,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 1 org x 2 jam - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam	2.0 OJ 2.0 OJ	1,000,000 900,000	2,000,000 1,800,000	RM
<i>F</i>	<u>PROSES BISNIS BKN</u>			7,650,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x 1KEGX1KL - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x1 KEG X 1KL	50.0 OK 50.0 OK	53,000 24,000	2,650,000 1,200,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 1 org x 2 jam - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam	2.0 OJ 2.0 OJ	1,000,000 900,000	2,000,000 1,800,000	RM
<i>G</i>	<u>PENYEMPURNAAN SOP</u>			57,310,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 100 ORG x 1 KEGX1KL - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 100ORG x 1 KEG X 1KL	100.0 OK 100.0 OK	53,000 24,000	5,300,000 2,400,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Perjalanan dinas dalam rangka MONEV SOP	1.0 PAKET	49,610,000	49,610,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4842.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		437,895,000	

4842.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen		437,895,000	
052	Pelaksanaan			437,895,000	U
A	FGD Pelaksanaan dan fasilitasi RB			61,500,000	
521211	Belanja Bahan			56,100,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Pengadaan ATK	1.0 PAKET	6,000,000	6,000,000	
	- KIT PESERTA	100.0 BUAH	400,000	40,000,000	
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 100ORG x 1 KEGX1KL	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 100 ORG x 1 KEG X 2KL	200.0 OK	24,000	4,800,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honor Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II)(1 org x 2 Jam x 1 keg)	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Pakar/praktisi(1 org x 2 Jam x 1 keg)	2.0 OJ	1,700,000	3,400,000	
B	PENYUSUNAN KONSEP ROADMAP RB TAHUN 2025-2029			68,900,000	
521211	Belanja Bahan			10,100,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 100ORG x 1 KEGX1KL	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 100 ORG x 1 KEG X 2KL	200.0 OK	24,000	4,800,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honor Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II)(1 org x 2 Jam x 1 keg)	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Pakar/praktisi(1 org x 2 Jam x 1 keg)	2.0 OJ	1,700,000	3,400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			53,400,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dan MP	1.0 PAKET	53,400,000	53,400,000	
C	REVIEW RENJA DAN RATL RB 2024			10,100,000	
521211	Belanja Bahan			10,100,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 100ORG x 1 KEGX1KL	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 100 ORG x 1 KEG X 2KL	200.0 OK	24,000	4,800,000	
D	Workshop manajemen perubahan			75,900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Pengadaan ATK - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 100ORG x 1 KEGX1KL - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 100 ORG x 1 KEG X 2KL	1.0 PAKET 100.0 OK 200.0 OK	6,000,000 53,000 24,000	16,100,000 6,000,000 5,300,000 4,800,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Honor Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II)(1 org x 2 Jam x 1 keg) - Pakar/praktisi(1 org x 2 Jam x 1 keg)	2.0 OJ 2.0 OJ	1,000,000 1,700,000	5,400,000 2,000,000 3,400,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Perjalanan dinas Workshop manajemen perubahan	1.0 PAKET	54,400,000	54,400,000	RM
<i>E</i>	<i>Pelaksanaan workshop agen Perubahan</i>			221,495,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Pengadaan ATK - KIT PESERTA	1.0 PAKET 157.0 BUAH	6,000,000 400,000	68,800,000 6,000,000 62,800,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Pakar/praktisi(1 org x 2 Jam x 1 keg)	4.0 OJ	1,700,000	6,800,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) - biaya perjalanan dinas - Uang Saku FULLDAY LUAR KOTA (153 ORANG X 1HARI) - Paket meeting FULLDAY eselon III ke bawah(153 org x 1PAKET) - Paket meeting FULLDAY eselon I dan II(6 org x 1PAKET)	1.0 paket 151.0 OK 151.0 OK 6.0 OK	50,690,000 105,000 498,000 692,000	145,895,000 50,690,000 15,855,000 75,198,000 4,152,000	RM
4843	<u>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</u>			3,550,790,000	
4843.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	10.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		3,550,790,000	
4843.EBD.952	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR <u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	2.0 Dokumen		231,750,000	
052	<u>Pelaksanaan</u> <i>Penyusunan Rencana Kerja TA 2025 Badan Kepegawaian Negara</i>			231,750,000 24,000,000	U
A					
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 40 ORG x 5KEGX1KL - Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 40 ORG x 35 KEG X 2KL	200.0 OK 400.0 OK	53,000 24,000	20,200,000 10,600,000 9,600,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 1 org x 2 jam	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam	2.0 OJ	900,000	1,800,000	
C	<i>Penyusunan Rencana Program dan Anggaran</i>			207,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			127,900,000	RM
	- Cetak Perjanjian Kinerja TA 2024	1.0 PAKET	5,000,000	5,000,000	
	- Cetak RENJA TA 2024	1.0 PAKET	5,000,000	5,000,000	
	> Rapat Biasa Penandatanganan Perjanjian Kerja 2025			117,900,000	
	- Pengadaan ATK	1.0 PAKET	5,000,000	5,000,000	
	- KIT Peserta	150.0 BUAH	200,000	30,000,000	
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 150ORG x 1 KEGX1KL	150.0 OK	53,000	7,950,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 150 ORG x 1 KEG X 2KL	300.0 OK	24,000	7,200,000	
	>> Rapat Penelaahan Pagu Anggaran dan Pagu Indikatif TA 2025		0	67,750,000	
	- Pengadaan ATK	1.0 PAKET	5,000,000	5,000,000	
	- KIT Peserta	150.0 BUAH	250,000	37,500,000	
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x 5 KEGX1KL	250.0 OK	53,000	13,250,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 50 ORG x 5 KEGX2KL	500.0 OK	24,000	12,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			79,850,000	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka penelaahan pagu indikatif TA 2025	1.0 PAKET	79,850,000	79,850,000	
4843.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.0 Dokumen		1,153,290,000	U
052	Pelaksanaan			1,153,290,000	
A	<i>Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun2024, Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Outlook Program dan Anggaran Tahun 2024</i>			429,201,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			92,060,000	RM
	- Backdrop	1.0 PAKET	5,000,000	5,000,000	
	- Pengadaan ATK	1.0 PAKET	9,000,000	9,000,000	
	- KIT PESERTA	144.0 BUAH	500,000	72,000,000	
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 30 ORG x 2 KEG X 1 KL	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 30 ORG x 2 KEG X 2 KL	120.0 OK	24,000	2,880,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,800,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam X 1 KEG	2.0 OJ	900,000	1,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			335,341,000	RM
	- Paket meeting Fullboard Eselon 1 dan 2	13.0 PAKET	1,347,000	17,511,000	
	- Paket Meeting Fullboard eselon 3 Kebawah	166.0 PAKET	1,197,000	198,702,000	
	- Uang Harian dan translok Fullboard	1.0 PAKET	52,380,000	52,380,000	
	- Paket Meeting Fullday	82.0 PAKET	455,000	37,310,000	
	- Paket Meeting Halfday	82.0 PAKET	359,000	29,438,000	
B	<i>Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Realisasi Anggaran Triwulan IV TA 2023 dan Triwulan I s/d III TA 2024</i>			724,089,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			240,450,000	RM
	- Pengadaan ATK	3.0 PAKET	5,000,000	15,000,000	
	- KIT PESERTA	450.0 BUAH	400,000	180,000,000	
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 150ORG x 3KEGX1KL	450.0 OK	53,000	23,850,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 150 ORG x 3 KEG X 2KL	900.0 OK	24,000	21,600,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			7,600,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) 1 org x 2 jam X2 KEG	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) 1 org x 2 jam X 2 KEG	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			476,039,000	9 RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2024	1.0 PAKET	476,039,000	476,039,000	*
4843.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen		2,165,750,000	
051	Perencanaan dan Persiapan			107,575,000	U
A	<i>Penyusunan Rancangan Awal LAKIP BKN Tahun 2023</i>			107,575,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			7,575,000	RM
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 75 ORG x 1 KALI x 1 KEG	75.0 OK	53,000	3,975,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 75 ORG x 2 KALI x 1 KE	150.0 OK	24,000	3,600,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			100,000,000	RM
	- Jasa Konsultan Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisasi BKN Terintegrasi	1.0 paket	100,000,000	100,000,000	
052	Pelaksanaan			2,058,175,000	U
A	<i>Pengembangan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (MAKO)</i>			129,350,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

Halaman : Z

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) Rapat Pembuatan Desain Sistem Informasi > Pengelolaan Kinerja Organisasi BKN Terintegrasi dan Pembangunan Sistem Informasi Pengelola Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 25 ORG x 1 KALI x 4 KEG - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 25 ORG x 2KALI x 4 KEG Penyusunan dan Penetapan Regulasi terkait >> Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisasi BKN Terintegrasi - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 75 ORG x 1 KALI x 1 KEG - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 75 ORG x 2 KALI x 1 KE	100.0 OK 200.0 OK 75.0 OK 150.0 OK	53,000 24,000 53,000 24,000 0	17,675,000 17,675,000 5,300,000 4,800,000 7,575,000 3,975,000 3,600,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan dan - Penetapan Regulasi terkait Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisas	1.0 PAKET	102,775,000	102,775,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Perjalanan dinas dalam kota dan translok	1.0 PAKET	8,900,000	8,900,000	RM
B	<i>Penyusunan Laporan Kinerja BKN TAHUN 2023</i>			34,300,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 150 ORG x 1 KALI x2 KEG - Pencetakan Buku Laporan Kinerja BKN 2023 - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 150 ORG x 2 KALI x 2 KEG	300.0 OK 10.0 BUKU 600.0 OK	53,000 200,000 24,000	32,300,000 15,900,000 2,000,000 14,400,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 1ORG x 1 Keg x 2 JAM	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	RM
C	<i>MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN KINERJA</i>			160,595,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) > Rapat Monev TW I dan III 2024 - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 35 ORG x 1 KALI x 6KEG - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 35 ORG x 1 KALI x 6KEG >> Rapat Momev TW IV 2023 dan TW II 2024 - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 150 ORG x 2 KALI x 2KEG - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 150 ORG x 1 KALI x 2 KEG	210.0 OK 420.0 OK	53,000 24,000 0 53,000 24,000	51,510,000 11,130,000 10,080,000 30,300,000 15,900,000 14,400,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Perjalanan dinas dalam rangka monev kinerja triwulan	1.0 PAKET	109,085,000	109,085,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,355,335,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Penyusunan RENSTRA TAHUN 2024-2029			1,507,650,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)			57,650,000	RM
	> RAPAT RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA TAHUN 2025-2029			57,650,000	
	- Pengadaan ATK	1.0 OK	5,000,000	5,000,000	
	- KIT PESERTA	150.0 BUAH	250,000	37,500,000	
	- Makan Rapat Biasa DKI JAKARTA 120ORG x 1 KEGX1KL	150.0 OK	53,000	7,950,000	
	- Snack Rapat Biasa DKI JAKARTA 120 ORG x 1 KEG X 2KL	300.0 OK	24,000	7,200,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.088-Jakarta III)			1,450,000,000	RM
	- JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RENSTRA	1.0 PAKET	1,450,000,000	1,450,000,000	
E	Penyusunan Pengelolaan Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi			111,130,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.088-Jakarta III)			100,000,000	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan program dan kegiatan Tahun 2024	1.0 PAKET	100,000,000	100,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.088-Jakarta III)			11,130,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 ORG x 1 KL x 12bln	24.0 OK	170,000	4,080,000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) dan perjalanan dinas lebih dari 8 jam	1.0 PAKET	7,050,000	7,050,000	
F	Penyusunan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI			115,150,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)			15,150,000	RM
	-Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 50 ORG x 1 KL X 3KEG	150.0 OK	53,000	7,950,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA 50 ORG x 2 KL X 3KEG	300.0 OK	24,000	7,200,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.088-Jakarta III)			80,000,000	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota Komisi II DPR RI	1.0 PAKET	40,000,000	40,000,000	
	- Perjalanan dinas luar kota jakarta dalam rangka rapat RDP dengan Anggota Komisi II DPR RI	1.0 PAKET	40,000,000	40,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.088-Jakarta III)			20,000,000	RM
	- Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam dalam rangka RDP dengan DPR	1.0 PAKET	20,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Timur, 6 Februari 2024

Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, M.AP

NIP. 196605091986032001

POK BIRO KEUANGAN

Unit Kerja : Biro Keuangan
 Alokasi : Rp. 332.474.894.000,-

KODE	SUBKOMP/ DETIL PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen				
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			332,474,894,000	
4843.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		330,824,894,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR				
4843.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		330,824,894,000	
001	Gaji dan Tunjangan			286,239,349,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			286,239,349,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			42,361,298,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	36,309,684,000	36,309,684,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,025,807,000	3,025,807,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,025,807,000	3,025,807,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			798,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	684,000	684,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	57,000	57,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	57,000	57,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,728,600,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	2,338,800,000	2,338,800,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	194,900,000	194,900,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	194,900,000	194,900,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			621,544,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	532,752,000	532,752,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	44,396,000	44,396,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	44,396,000	44,396,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,046,940,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	1,754,520,000	1,754,520,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	146,210,000	146,210,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	146,210,000	146,210,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			7,301,868,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	6,258,744,000	6,258,744,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	521,562,000	521,562,000	

	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	521,562,000	521,562,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			182,742,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	156,636,000	156,636,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	13,053,000	13,053,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	13,053,000	13,053,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,189,992,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	2,189,992,000	2,189,992,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			9,785,160,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	9,785,160,000	9,785,160,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.088-Jakarta III)			796,390,000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	1.0 THN	682,620,000	682,620,000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	56,885,000	56,885,000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	56,885,000	56,885,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,167,296,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	3,571,968,000	3,571,968,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	297,664,000	297,664,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	297,664,000	297,664,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.088-Jakarta III)			280,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	240,000	240,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	20,000	20,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.088-Jakarta III)			696,738,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.0 THN	597,204,000	597,204,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	49,767,000	49,767,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	49,767,000	49,767,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.088-Jakarta III)			325,444,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PPPK	1.0 THN	278,952,000	278,952,000	
	- Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	23,246,000	23,246,000	
	- Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	23,246,000	23,246,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,260,868,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1.0 THN	1,080,744,000	1,080,744,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	90,062,000	90,062,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	90,062,000	90,062,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.088-Jakarta III)			681,338,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PPPK	1.0 THN	681,338,000	681,338,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u>			1,639,440,000	RM

	(KPPN.088-Jakarta III)					
511633	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	1,639,440,000	1,639,440,000		
	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u>			51,548,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Belanja Tunj. Umum PPPK	1.0 THN	44,184,000	44,184,000		
	- Belanja Tunj. Umum PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,682,000	3,682,000		
512211	- Belanja Tunj. Umum PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,682,000	3,682,000		
	<u>Belanja Uang Lembur</u>			172,800,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Uang Lembur Gol IV [10 ORG x 1 JAM x 45 HR]	450.0 OJ	36,000	16,200,000		
	- Uang Lembur Gol III [50 ORG x 2 JAM x 45 HR]	4500.0 OJ	30,000	135,000,000		
512212	- Uang Lembur Gol II [10 ORG x 2 JAM x 45 HR]	900.0 OJ	24,000	21,600,000		
	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u>			156,600,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Uang Lembur Gol III [50 ORG x 2 JAM x 45 HR]	4500.0 OJ	30,000	135,000,000		
	- Uang Lembur Gol II [10 ORG x 2 JAM x 45 HR]	900.0 OJ	24,000	21,600,000		
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u>			201,347,238,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Tunjangan Kinerja Pegawai	1.0 THN	173,564,181,000	173,564,181,000		
	- Tunjangan Kinerja Pegawai (gaji ke 13)	1.0 BLN	13,891,528,000	13,891,528,000		
	- Tunjangan Kinerja Pegawai (gaji ke 14)	1.0 BLN	13,891,529,000	13,891,529,000		
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u>			7,724,427,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Belanja Tunj. Kinerja PPPK	1.0 THN	6,620,940,000	6,620,940,000		
	- Belanja Tunj. Kinerja PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	551,745,000	551,745,000		
	- Belanja Tunj. Kinerja PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	551,742,000	551,742,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,069,200,000		U
<i>J</i>	<i>Tim Pengelola Kegiatan BKN</i>			<i>130,248,000</i>		
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			130,248,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,324,000	27,888,000		
	- Staf Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	836,000	10,032,000		
	- Staf Kuasa Pengguna Anggaran 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,254,000	15,048,000		
	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,292,000	15,504,000		
	- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,124,000	13,488,000		
	- Pejabat Pembuat Daftar Gaji [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	836,000	10,032,000		
	- Atasan Langsung Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	616,000	7,392,000		
	- Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	504,000	6,048,000		
	- Petugas Penerima [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	564,000	20,304,000		
	- Petugas Penerima [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	376,000	4,512,000		
<i>K</i>	<i>Tim Pengelola Kegiatan BPP</i>			<i>61,800,000</i>		
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			61,800,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Roumum - Rutin [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	588,000	7,056,000		
	- Roumum - SBSN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	460,000	5,520,000		
	- Roku [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	736,000	8,832,000		

	-	Roreno, PPM ASN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	342,000	4,104,000	
	-	Ro HHK, Insp [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
	-	Puskobankum, Set. BPASN, Pusbin JFK, Pusrent [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
	-	Ro SDM, DPN Korpri [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
	-	Dit. Pensiun, Dit. SKK, Dit. KP [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	256,000	3,072,000	
	-	Dit. PPU, Dit. Jabatan ASN, Dit. Kinerja, Dit. Kompensasi [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
	-	Dit. Wasdal I - IV [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	256,000	3,072,000	
	-	Dit. INTI [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	632,000	7,584,000	
	-	Dit. PPSI, Dit. PDPIK, Dit. AK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
	-	PNBP PPSS [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	256,000	3,072,000	
	-	Puspenkom RM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	256,000	3,072,000	
	-	PNBP Puspenkom, PPSS RM, BA BUN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
L		<i>Tim Pengelola Kegiatan Staf PPK</i>			146,424,000	
521115		<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			146,424,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Roumum - Rutin 1 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	588,000	7,056,000	
	-	Roumum - Rutin 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	392,000	4,704,000	
	-	Roumum - SBSN 1 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	690,000	8,280,000	
	-	Roumum - SBSN 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	460,000	5,520,000	
	-	Roku [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	736,000	17,664,000	
	-	Roreno, PPM ASN [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	228,000	5,472,000	
	-	Ro HHK, Insp [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	-	Puskobankum, Set. BPASN, Pusbin JFK, Pusrent [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	-	Ro SDM, DPN Korpri 1 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	342,000	4,104,000	
	-	Ro SDM, DPN Korpri 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
	-	Dit. Pensiun, Dit. SKK, Dit. KP [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	384,000	9,216,000	
	-	Dit. PPU, Dit. Jabatan ASN, Dit. Kinerja, Dit. Kompensasi [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	-	Dit. Wasdal I - IV [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	384,000	9,216,000	
	-	Dit. INTI 1 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	632,000	7,584,000	
	-	Dit. INTI 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	948,000	11,376,000	
	-	Dit. PPSI, Dit. PDPIK, Dit. AK [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	-	PNBP PPSS [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	256,000	6,144,000	
	-	Puspenkom RM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	256,000	3,072,000	
	-	Puspenkom RM 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	384,000	4,608,000	
	-	PNBP Puspenkom, PPSS RM, BA BUN 1 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	342,000	4,104,000	
	-	PNBP Puspenkom, PPSS RM, BA BUN 2 [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	228,000	2,736,000	
M		<i>Tim Pengelola Kegiatan PPK</i>			242,640,000	
521115		<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			242,640,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Roumum - Rutin [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,992,000	23,904,000	
	-	Roumum - SBSN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,232,000	26,784,000	
	-	Roku [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,052,000	24,624,000	
	-	Roreno, PPM ASN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	884,000	10,608,000	
	-	Ro HHK, Insp [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	884,000	10,608,000	
	-	Puskobankum, Set. BPASN, Pusbin JFK, Pusrent [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	884,000	10,608,000	

	-	Ro SDM, DPN Korpri [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	884,000	10,608,000	
	-	Dit. Pensiun, Dit. SKK, Dit. KP [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,008,000	12,096,000	
	-	Dit. PPU, Dit. Jabatan ASN, Dit. Kinerja, Dit. Kompensasi [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	884,000	10,608,000	
	-	Dit. Wasdal I - IV [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,008,000	12,096,000	
	-	Dit. INTI [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,778,000	33,336,000	
	-	Dit. PPSI, Dit. PDPIK, Dit. AK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,326,000	15,912,000	
	-	PNBP PPSS [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,512,000	18,144,000	
	-	Puspenkom RM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,008,000	12,096,000	
	-	PNBP Puspenkom, PPSS RM, BA BUN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	884,000	10,608,000	
N		<i>Honorarium UAPA dan UAKPA</i>			42,000,000	
521115		<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.088-Jakarta III)			42,000,000	RM
	>	Tim UAPA			28,800,000	
	-	Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	600,000	7,200,000	
	-	Ketua/Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	400,000	4,800,000	
	-	Anggota/Petugas [4 ORG x 12 BLN]	48.0 OB	350,000	16,800,000	
	>	Tim UAKPA			13,200,000	
	-	Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	-	Ketua/Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	-	Anggota/Petugas [4 ORG x 12 BLN]	48.0 OB	150,000	7,200,000	
O		<i>Tim Pengelola Kegiatan BMN</i>			19,200,000	
521115		<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.088-Jakarta III)			19,200,000	RM
	-	Tim Pengurus/Penyimpan BMN [4 ORG x 12 BLN]	48.0 OB	400,000	19,200,000	
P		<i>Monev dan Pembinaan Keuangan oleh Pimpinan ke Kantor Regional</i>			421,888,000	
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			421,888,000	RM
	-	Perjalanan Dinas dalam Rangka Monev dan Pembinaan	1.0 PKT	421,888,000	421,888,000	
Q		<i>Layanan Ketatausahaan Manajemen Keuangan</i>			5,000,000	
521813		<u>Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges</u> (KPPN.088-Jakarta III)			5,000,000	RM
	-	Pengadaan Materai	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	
	-	Biaya Admin	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
4843.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR	10.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,650,000,000	
4843.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan	2.0 Dokumen		1,650,000,000	
051		Perencanaan dan Persiapan			77,860,000	U
A		<i>Penyusunan Roadmap Satu Data Keuangan Biro Keuangan BKN</i>			46,060,000	
521211		<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			6,060,000	RM
	-	Jamuan Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KL x 3 KEGI]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	-	Jamuan Snack Rapat Biasa [20 ORG x 2 KL x 3 KEGI]	120.0 OK	24,000	2,880,000	
522131		<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			40,000,000	RM

	-	Jasa Konsultasi Penyusunan Roadmap Satu Data Keuangan Biro Keuangan BKN	1.0 PKT	40,000,000	40,000,000		
B		<i>Penyusunan Regulasi Implementasi Pemanfaatan E-Verifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian</i>			31,800,000		
521213		<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>			31,800,000	9	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	>	Tim Penyusunan Regulasi Implementasi Pemanfaatan E-Verifikasi di Lingkungan			31,800,000		
	-	Pengarah [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	750,000	2,250,000	*	
	-	Penanggung Jawab [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	700,000	2,100,000	*	
	-	Ketua [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	650,000	1,950,000	*	
	-	Anggota [17 ORG x 3 BLN]	51.0 OB	500,000	25,500,000	*	
052		Pelaksanaan			1,345,567,000	U	
A		<i>Rapat Pengelolaan Keuangan TA 2024</i>			407,092,000		
521211		<u>Belanja Bahan</u>			93,930,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	-	Jamuan Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KL x 31 KEG]	930.0 OK	53,000	49,290,000		
	-	Jamuan Snack Rapat Biasa [30 ORG x 2 KL x 31 KEG]	1860.0 OK	24,000	44,640,000		
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			272,362,000	9	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	-	Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan TA	1.0 PKT	240,412,000	240,412,000		
	-	Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan TA	1.0 PKT	31,950,000	31,950,000	*	
524113		<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			40,800,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	-	Transportasi Lokal Dalam Kota [4 ORG x 60 KL]	240.0 OK	170,000	40,800,000		
B		<i>Pengelolaan PNPB</i>			6,060,000		
521211		<u>Belanja Bahan</u>			6,060,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	-	Jamuan Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KL x 2 KEG]	60.0 OK	53,000	3,180,000		
	-	Jamuan Snack Rapat Biasa [30 ORG x 2 KL x 2 KEG]	120.0 OK	24,000	2,880,000		
C		<i>Pengelolaan Keuangan Data Elektronik</i>			198,000,000		
522191		<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			198,000,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	-	Scaning dan Konversi Dokumen Keuangan	1.0 PKT	198,000,000	198,000,000		
D		<i>Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2023 dan Semester I TA 2024 di</i>			78,400,000		
521211		<u>Belanja Bahan</u>			63,600,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	>	DKI Jakarta			63,600,000		
	-	ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000		
	-	Jamuan Makan Rapat Biasa [100 ORG x 3 HR x 1 KL x 2 KEG]	600.0 OK	53,000	31,800,000		
	-	Jamuan Snack Rapat Biasa [100 ORG x 3 HR x 2 KL x 2 KEG]	1200.0 OK	24,000	28,800,000		
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>			14,800,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)					
	-	Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG]	4.0 OK	1,000,000	4,000,000		
	-	Narasumber Eselon III [3 ORG x 2 JAM x 2 KEG]	12.0 OK	900,000	10,800,000		
E		<i>Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2023 di Kantor Regional III BKN</i>			162,620,000		
521211		<u>Belanja Bahan</u>			47,600,000		RM

	(KPPN.088-Jakarta III)					
	> Jawa Barat				47,600,000	
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT		5,000,000	5,000,000	
	- Seminar Kit	100.0 Buah		150,000	15,000,000	
	- Jamuan Makan Rapat Biasa [100 ORG x 3 HR x 1 KL x 1 KEG	300.0 OK		50,000	15,000,000	
	- Jamuan Snack Rapat Biasa [100 ORG x 3 HR x 2 KL x 1 KEG	600.0 OK		21,000	12,600,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				5,600,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2.0 OK		1,000,000	2,000,000	
	- Narasumber Eselon III [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	4.0 OK		900,000	3,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				109,420,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan Dinas dalam Rangka Workshop Penyusunan Laporan Keuangan	1.0 PKT		109,420,000	109,420,000	
F	<i>Pembinaan Perbendaharaan, Verifikasi dan SAP yang bertajuk NGUPAS (Ngobrol Urusan Pelayanan dan Akuntabilitas)</i>				128,720,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				43,120,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Jamuan Makan Rapat Biasa [70 ORG x 8 KL]	560.0 OK		53,000	29,680,000	
	- Jamuan Snack Rapat Biasa [70 ORG x 8 KL]	560.0 OK		24,000	13,440,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				85,600,000	9 RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Narasumber Eselon I [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG]	4.0 OK		1,000,000	4,000,000	*
	- Narasumber Eselon II [2 ORG x 2 JAM x 5 KEG]	20.0 OK		1,000,000	20,000,000	*
	- Narasumber Eselon III [4 ORG x 2 JAM x 5 KEG]	40.0 OK		900,000	36,000,000	*
	- Narasumber Eselon II [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	4.0 OK		1,000,000	4,000,000	
	- Narasumber Eselon III [4 ORG x 2 JAM x 3 KEG]	24.0 OK		900,000	21,600,000	
G	<i>Pencetakan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan</i>				67,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>				67,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Pencetakan Laporan Verifikasi	1.0 PKT		4,000,000	4,000,000	
	- Pencetakan Laporan Keuangan	2.0 PKT		25,000,000	50,000,000	
	- Pencetakan Laporan Perbendaharaan	1.0 PKT		4,000,000	4,000,000	
	- Pencetakan Laporan Ketatausahaan	1.0 PKT		4,000,000	4,000,000	
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT		5,000,000	5,000,000	
H	<i>Penyampaian Laporan Keuangan BKN Audited pada Publik</i>				52,020,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>				52,020,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Pengadaan Publikasi pada Media Cetak Nasional	1.0 PKT		52,020,000	52,020,000	
I	<i>Pendampingan Pemeriksaan BPK RI</i>				90,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				90,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	1.0 PKT		90,000,000	90,000,000	
J	<i>Implementasi Tim Penguatan Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan BKN</i>				22,800,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>				22,800,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					

	>	Tim Penguatan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan			22,800,000	
	-	Penanggung Jawab [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	500,000	2,000,000	
	-	Ketua [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	400,000	1,600,000	
	-	Sekretaris [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	300,000	1,200,000	
	-	Anggota [15 ORG x 4 BLN]	60.0 OB	300,000	18,000,000	
K		<i>Workshop Implementasi Aplikasi E-Verifikasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta</i>			132,855,000	
521211		<u>Belanja Bahan</u>			22,090,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	>	Daerah Istimewa Yogyakarta			22,090,000	
	-	ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	-	Seminar Kit	70.0 Buah	200,000	14,000,000	
	-	Jamuan Makan Rapat Biasa [70 ORG x 1 HR x 1 KL x 1 KEG	70.0 OK	55,000	3,850,000	
	-	Jamuan Snack Rapat Biasa [70 ORG x 1 HR x 2 KL x 1 KEG	140.0 OK	16,000	2,240,000	
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>			5,600,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2.0 OK	1,000,000	2,000,000	
	-	Narasumber Eselon III [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	4.0 OK	900,000	3,600,000	
524111		<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			105,165,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Perjalanan Dinas dalam Rangka Implementasi Aplikasi E-Verifikasi	1.0 PKT	105,165,000	105,165,000	
053		Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan			226,573,000	U
A		<i>Evaluasi Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan</i>			21,175,000	
521211		<u>Belanja Bahan</u>			21,175,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Jamuan Makan Rapat Biasa [55 ORG x 5 KL]	275.0 OK	53,000	14,575,000	
	-	Jamuan Snack Rapat Biasa [55 ORG x 5 KL]	275.0 OK	24,000	6,600,000	
B		<i>Penyelenggaraan FGD Pengelolaan Keuangan BKN</i>			205,398,000	
521211		<u>Belanja Bahan</u>			16,000,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Seminar Kit	80.0 Buah	200,000	16,000,000	
522151		<u>Belanja Jasa Profesi</u>			5,600,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2.0 OK	1,000,000	2,000,000	
	-	Narasumber Eselon III [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	4.0 OK	900,000	3,600,000	
524119		<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			183,798,000	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
	-	Biaya Paket Meeting Fullboard (Eselon II ke atas) di Jawa Barat [3 ORG x 2 PKT]	6.0 PKT	1,110,000	6,660,000	
	-	Biaya Paket Meeting Fullboard (Eselon III ke bawah) di Jawa Barat [77 ORG x 2 PKT]	154.0 PKT	822,000	126,588,000	
	-	Uang Harian Fullboard di Luar Kota [3 ORG x 2 HR]	6.0 OH	150,000	900,000	
	-	Uang Harian Fullboard di Luar Kota [77 ORG x 3 HR]	231.0 OH	150,000	34,650,000	
	-	Biaya Transport	1.0 PKT	15,000,000	15,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen			4,867,267,000	
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM			4,867,267,000	
4842.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	2727.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		4,867,267,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4842.EBC.954	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Manajemen SDM	2600.0 Orang		4,153,677,000	
051	Perencanaan dan Persiapan			355,000,000	U
A	Evaluasi dan Seleksi JPT Madya dan Pratama BKN			234,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)			18,000,000	RM
	> Rapat Persiapan dan Evaluasi Seleksi JPT Madya dan Pratama			6,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 4 KL - Persiapan JPT	80.0 OK	53,000	4,240,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 4 KL - Persiapan JPT	80.0 OK	22,000	1,760,000	
	> Seleksi JPT Madya dan Pratama			12,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 8 KL - JPT	160.0 OK	53,000	8,480,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 8 KL - JPT	160.0 OK	22,000	3,520,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.088-Jakarta III)			90,000,000	RM
	- Jasa Tes Kompetensi JPT Madya dan Pratama	1.0 PKT	90,000,000	90,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.088-Jakarta III)			122,400,000	RM
	> Seleksi JPT Pratama			81,600,000	
	- Pakar/Praktisi 3 ORG x 2 JAM x 8 KL	48.0 OJ	1,700,000	81,600,000	
	> Seleksi Mutasi			40,800,000	
	- Pakar/Praktisi 3 ORG x 2 JAM x 4 KL	24.0 OJ	1,700,000	40,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.088-Jakarta III)			3,600,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 12 kl	24.0 OK	150,000	3,600,000	
B	Evaluasi dan Pengelolaan HCDDP Pegawai BKN			61,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III)			18,000,000	RM
	> Evaluasi dan Pengelolaan HCDDP Pegawai BKN			18,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 12 KL - HCDDP	240.0 OK	53,000	12,720,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 12 KL - HCDDP	240.0 OK	22,000	5,280,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.088-Jakarta III)			40,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi dan Pengelolaan HCDDP Pegawai BKN	1.0 PKT	40,000,000	40,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 10 kl	20.0 OK	150,000	3,000,000	
C	<u>Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Pegawai BKN</u>			60,000,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			27,000,000	
	> Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Pegawai BKN			27,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 18 KL - Kebutuhan	360.0 OK	53,000	19,080,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 18 KL - Kebutuhan	360.0 OK	22,000	7,920,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			30,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan HCDP Pegawai BKN	1.0 PKT	30,000,000	30,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 10 kl	20.0 OK	150,000	3,000,000	
052	Pelaksanaan			3,493,982,000	U
A	<u>Pelaksanaan Ujian dinas, UPKP, PPP</u>			19,500,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			7,500,000	
	> Pelaksanaan Ujian dinas, UPKP, PPP			7,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 25 ORG x 4 KL - UD	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 25 ORG x 4 KL - UD	100.0 OK	22,000	2,200,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			12,000,000	RM
	- Penguji Ujian Dinas 12 ORG X 2 KL X 1 KEG	24.0 OK	500,000	12,000,000	
B	<u>Penyelenggaraan Mutasi Kepegawaian BKN</u>			688,175,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			177,000,000	RM
	> Pelantikan Pegawai BKN			75,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 100 ORG x 10 KL - Pelantikan	1000.0 OK	53,000	53,000,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 100 ORG x 10 KL - Pelantikan	1000.0 OK	22,000	22,000,000	
	> BAPERJAKAT			49,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 33 KL - Baperjakat	660.0 OK	53,000	34,980,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 33 KL - Baperjakat	660.0 OK	22,000	14,520,000	
	> Rapat Pengelolaan JF			15,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 10 KL - JFT	200.0 OK	53,000	10,600,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 10 KL - JFT	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	> Pelaksanaan CASN BKN			37,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 50 ORG x 10 KL - CASN	500.0 OK	53,000	26,500,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 50 ORG x 10 KL - CASN	500.0 OK	22,000	11,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			16,000,000	RM
	- Honorarium Rohaniawan 4 ORG X 10 KEG	40.0 OK	400,000	16,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			483,175,000	9 RM
	- mutasi pindah wilayah untuk pegawai BKN	1.0 PKT	483,175,000	483,175,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			12,000,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 40 kl	80.0 OK	150,000	12,000,000	
C	<u>Pelayanan Kesejahteraan Pegawai BKN</u>			432,350,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			67,500,000	RM
	> Pelaksanaan P4GN PUG di Lingkungan BKN			9,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 5 KL - P4GN PUG	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 5 KL - P4GN PUG	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Pencetakan	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	> Kegiatan Purnabhakti di Lingkungan BKN			40,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 45 ORG x 12 KL - Purnabhakti	540.0 OK	53,000	28,620,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 45 ORG x 12 KL - Purnabhakti	540.0 OK	22,000	11,880,000	
	> Pelaksanaan Senam di Lingkungan BKN			18,000,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 50 ORG x 36 KL - Purnabhakti	1800.0 OK	10,000	18,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			18,000,000	RM
	- Kegiatan Senam di Lingkungan BKN Pusat	1.0 PKT	18,000,000	18,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			333,350,000	RM
	- Pengadaan Obat - obatan Poli Umum	5.0 PKT	50,000,000	250,000,000	
	- Pengadaan Obat - obatan Poli Gigi	1.0 PKT	58,000,000	58,000,000	
	- Pengadaan Bahan Operasional Poli Gigi	5.0 PKT	600,000	3,000,000	
	> Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			22,350,000	
	- Pengadaan Regent Stik dalam rangka Pemeriksaan Narkoba untuk Pegawai BKN	149.0 BH	150,000	22,350,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			13,500,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 45 kl	90.0 OK	150,000	13,500,000	
D	<i>Sekretariat DPN KORPRI (Rincian Output)</i>			2,000,000,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.088-Jakarta III)			10,000,000	RM
	- Keperluan Sehari - hari	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.088-Jakarta III)			30,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Dinas	1.0 PKT	30,000,000	30,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			9,000,000	RM
	- Pencetakan Plakat Seremonial	20.0 BH	450,000	9,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			136,203,000	RM
	- Pengadaan Obat - Obatan	1.0 PKT	15,000,000	15,000,000	
	- Biaya Cetakan	1.0 PKT	40,203,000	40,203,000	
	- Pengadaan ATK	1.0 PKT	40,500,000	40,500,000	
	- Bahan Komputer	1.0 PKT	40,500,000	40,500,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.088-Jakarta III)			90,000,000	RM
	- Telepon / Internet	12.0 BLN	7,500,000	90,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			71,100,000	RM
	- Sewa Mesin Fotocopy	12.0 BLN	3,000,000	36,000,000	
	- Sewa PC AIO 3 unit x 12 bln	36.0 BLN	975,000	35,100,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			597,168,000	RM
	- Biaya Pramubhakti 3 Org x 13 bln	39.0 OB	5,104,000	199,056,000	
	- Biaya Petugas Kebersihan 3 Org x 13 bln	39.0 OB	5,104,000	199,056,000	
	- Biaya Pengemudi 3 Org x 13 bln	39.0 OB	5,104,000	199,056,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,056,529,000	9	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsolidasi Organisasi	1.0 PKT	685,595,000	685,595,000	*	
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka PORNAS KORPRI TA 2024	1.0 PKT	310,934,000	310,934,000	*	
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan BAKOHUMAS	1.0 PKT	60,000,000	60,000,000	*	
<i>E</i>	<i>Layanan Kenaikan Pangkat di Lingkungan BKN</i>			<i>70,824,000</i>		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			18,000,000		RM
	> Rapat Koordinasi Layanan Kenaikan Pangkat di Lingkungan BKN			18,000,000		
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 12 KL - KP	240.0 OK	53,000	12,720,000		
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 12 KL - KP	240.0 OK	22,000	5,280,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			52,824,000		RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka MOnitoring dan Evaluasi Layanan Kenaikan Pangkat BKN	1.0 PKT	52,824,000	52,824,000		
<i>F</i>	<i>Pembekalan PPPK CPNS BKN</i>			<i>33,800,000</i>		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			30,800,000		RM
	> Pembekalan PPPK CPNS STAN			30,800,000		
	- Biaya Makan rapat Biasa 200 ORG x 1 KL - Pembekalan	200.0 OK	53,000	10,600,000		
	- Biaya Snack rapat Biasa 200 ORG x 2 KL - Pembekalan	400.0 OK	22,000	8,800,000		
	- Biaya Perlengkapan Pembekalan	1.0 PKT	11,400,000	11,400,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000		RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 10 kl	20.0 OK	150,000	3,000,000		
<i>G</i>	<i>Pembinaan Kinerja dan Penegakan Disiplin Pegawai</i>			<i>214,833,000</i>		
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000		RM
	- Pengiriman Dokumen Disiplin dan Kinerja Pegawai	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			63,000,000	RM
	> Pelaksanaan Konseling Karir			10,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 6 KL - Konseling	120.0 OK	53,000	6,360,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 6 KL - Konseling	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya Pencetakan Media Fisik Layanan Konseling Karir	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	> RAPIM DISIPLIN			22,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 15 KL - Disiplin	300.0 OK	53,000	15,900,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 15 KL - Disiplin	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	> Rapat Implementasi E-Kinerja BKN			30,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 100 ORG x 4 KL - Kinerja	400.0 OK	53,000	21,200,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 100 ORG x 4 KL - Kinerja	400.0 OK	22,000	8,800,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			11,400,000	RM
	> Workshop Penerapan Sistem Manajemen Kinerja			11,400,000	
	- Narasumber Eselon II KEMENPAN 1 Org x 3 Jam x 2 KL	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
	- Narasumber Eselon III KEMENPAN 1 Org x 3 Jam x 2 KL	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			128,433,000	RM
	Perjalanan Dinas dalam rangka Penegakan Disiplin Pegawai, Pembinaan Kinerja Pegawai, dan Konseling Pegawai di Lingkungan BKN Pusat	1.0 PKT	128,433,000	128,433,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			9,000,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) 2 org x 30 kl	60.0 OK	150,000	9,000,000	
H	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Rencana Karir Pegawai BKN</i>			34,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,500,000	RM
	> Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Rencana Karir Pegawai BKN			4,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 3 KL - Kebutuhan	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 3 KL - Kebutuhan	60.0 OK	22,000	1,320,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			30,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan HCDP Pegawai BKN	1.0 PKT	30,000,000	30,000,000	
053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan			304,695,000	U
A	<i>Pengolahan informasi Data kepegawaian yang akurat, lengkap dan terkini</i>			289,695,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 4,867,267,000

Halaman : Z

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			10,500,000	RM
	> Rapat Pengelolaan SIMPEG BKN			10,500,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 7 KL - SIMPEG Tata Naskah	140.0 OK	53,000	7,420,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 7 KL - SIMPEG Tata Naskah	140.0 OK	22,000	3,080,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			279,195,000	RM
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional 2024	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Kepegawaian	1.0 PKT	229,195,000	229,195,000	
B	<i>Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan BKN</i>			15,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			15,000,000	RM
	> Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan BKN			15,000,000	
	- Biaya Makan rapat Biasa 20 ORG x 10 KL - TU	200.0 OK	53,000	10,600,000	
	- Biaya Snack rapat Biasa 20 ORG x 10 KL - TU	200.0 OK	22,000	4,400,000	
4842.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	127.0 Orang		713,590,000	
052	Pelaksanaan			713,590,000	U
A	<i>Diklat Kedinasan</i>			210,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			210,000,000	RM
	- Biaya Diklat Pimpinan Tingkat II 1 ORG x 7 PKT	7.0 PKT	30,000,000	210,000,000	
B	<i>Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional</i>			254,435,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			254,435,000	RM
	- Biaya Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional	1.0 PKT	254,435,000	254,435,000	
C	<i>Pengembangan Kapasitas SDM BKN</i>			249,155,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			249,155,000	RM
	- Biaya Diklat Pengembangan Kapasitas SDM BKN	1.0 PKT	249,155,000	249,155,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Timur, 12 Februari 2024

Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, M.AP

NIP. 196605091986032001

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 105,995,117,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen			105,995,117,000	
	4843 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			105,995,117,000	
4843.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		45,185,545,000	

	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR				
4843.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		139,000,000	
052	Pelaksanaan			139,000,000	U
A	Pengelolaan Sistem Pergudangan			30,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan sistem pergudangan	1.0 PKT	30,000,000	30,000,000	
B	Pembinaan/Pengawasan/Monitoring Pengelolaan BMN			109,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			98,800,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pembangunan/renovasi sarana fisik di Kanreg dan UPT BKN	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pengelolaan BMN	1.0 PKT	48,800,000	48,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10,200,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Transport Lokal Kegiatan Dalam Kota (PP)	60.0 KL	170,000	10,200,000	
4843.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		461,000,000	
052	Pelaksanaan			461,000,000	U
A	Layanan Kerumahtangaan			50,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			50,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kerumahtangaan	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
B	Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Regional dan UPT BKN			145,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			145,600,000	9 RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi	1.0 PKT	84,600,000	84,600,000	*
	- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pencatatan dan penghapusan BMN	1.0 PKT	61,000,000	61,000,000	
C	Workshop Pengadaan Barang dan Jasa			23,720,000	
521211	Belanja Bahan			16,520,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Pengadaan ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Makan Rapat [80 ORG x 2 KL]	160.0 OK	53,000	8,480,000	
	- Biaya Snack Rapat [80 ORG x 4 KL]	320.0 OK	22,000	7,040,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			7,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber Pejabat Es III kebawah/yang disetarakan [2 ORG x 4 JAM]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	
D	<i>Tim Pengelolaan Ekatalog Sektoral</i>			34,050,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			34,050,000	RM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	700,000	2,100,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG]	3.0 OB	650,000	1,950,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG]	3.0 OB	500,000	1,500,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [19 ORG x 3 BLN]	57.0 OB	500,000	28,500,000	SBM
E	<i>Tim Percepatan Indeks PBJ</i>			34,050,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			34,050,000	RM
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	700,000	2,100,000	SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG]	3.0 OB	650,000	1,950,000	SBM
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [1 ORG]	3.0 OB	500,000	1,500,000	SBM
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK Es. 1) [19 ORG x 3 BLN]	57.0 OB	500,000	28,500,000	SBM
F	<i>Pembinaan/Pengawasan/Monitoring Pengelolaan PBJ</i>			168,180,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			149,680,000	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan PBJ di Lingkungan BKN	1.0 PKT	149,680,000	149,680,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			18,500,000	RM
	- Transport Lokal Kegiatan Dalam Kota (PP)	50.0 KL	170,000	8,500,000	
	- Perjalanan dinas dalam kota	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
G	<i>Penyusunan Laporan BMN</i>			5,400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			5,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 3 JAM x 2 KL]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	SBM
4843.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		43,516,345,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			43,516,345,000	U
A	<i>Persuratan</i>			735,100,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,600,000	RM
	- Perlengkapan Kurir [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	1,200,000	3,600,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.088-Jakarta III)			714,500,000	RM
	- Biaya pengepakan dan pengiriman surat dinas	1.0 PKT	714,500,000	714,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			17,000,000	RM
	- Box Arsip	1000.0 UNIT	17,000	17,000,000	
<i>B</i>	<i>Layanan Pengadaan</i>			200,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			200,000,000	RM
	- Cetakan Formulir Kepegawaian/Amplop Besar/Amplop Kecil/Sertifikat	1.0 PKT	150,000,000	150,000,000	
	- Cetakan Stopmap BKN	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Gedung</i>			4,483,298,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,413,298,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung BKN	44450.0 m2	94,800	4,213,860,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung	19085.0 m2	10,450	199,438,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			70,000,000	RM
	- IPL Apartemen dan Rumah Dinas BKN	1.0 PKT	70,000,000	70,000,000	
<i>D</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan Kantor</i>			2,947,663,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			50,000,000	RM
	- Jasa Pemandahan Barang Inventaris	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.088-Jakarta III)			2,897,663,000	RM
	- Pemeliharaan Instalasi Listrik Gd II	1.0 PKT	199,000,000	199,000,000	
	- Pemeliharaan Instalasi Listrik Gd I dan III	1.0 PKT	103,438,000	103,438,000	
	- Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi PABX Gd I, II, dan III	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	1200.0 OT	80,000	96,000,000	
	> Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya			2,399,225,000	
	- Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	2.0 PKT	35,000,000	70,000,000	
	>> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor		0	1,576,350,000	
	- Pemeliharaan Cooling Tower Gedung III	2.0 UNIT	59,000,000	118,000,000	
	- Pemeliharaan AC Chiller AHU Gedung II	104.0 UB	1,500,000	156,000,000	
	- Pemeliharaan AC Split dan Cassette	263.0 UNIT	450,000	118,350,000	
	- Pemeliharaan Chiller Gedung II No 1 dan 2	2.0 UNIT	95,000,000	190,000,000	
	- Pemeliharaan Chiller Gedung II no 3 dan 4	2.0 UNIT	95,000,000	190,000,000	
	- Pemeliharaan Chiller Gedung II No 5	1.0 UNIT	95,000,000	95,000,000	
	- Pemeliharaan Compressor AC Gedung I	6.0 UNIT	33,000,000	198,000,000	
	- Pemeliharaan Compressor AC Gedung III	8.0 UNIT	24,700,000	197,600,000	
	- Pemeliharaan AC Central Gedung I	5.0 UNIT	15,000,000	75,000,000	
	- Pemeliharaan Cooling Tower Gedung I	2.0 UNIT	36,000,000	72,000,000	
	- Pemeliharaan AC Central Gedung III	8.0 UNIT	20,800,000	166,400,000	
	>> Pemeliharaan Printer		0	186,000,000	
	- Pemeliharaan Printer Gedung I, II, dan III	465.0 UNIT	400,000	186,000,000	
	>> Pemeliharaan Komputer		0	566,875,000	
	- Pemeliharaan Komputer Gedung I	210.0 UNIT	375,000	78,750,000	
	- Pemeliharaan Komputer Gedung II	545.0 UNIT	375,000	204,375,000	
	- Pemeliharaan Komputer Gedung III	362.0 UNIT	375,000	135,750,000	
	- Pemeliharaan PABX Unit	4.0 PKT	37,000,000	148,000,000	
E	Pemeliharaan Sarana Kantor			2,042,699,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
UNIT ORG (01) **Badan Kepegawaian Negara**
UNIT KERJA (017220) **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA**
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,010,299,000	RM
	- Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 250 KVA	2.0 UNIT	16,793,000	33,586,000	
	- Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 500 KVA	2.0 UNIT	31,770,000	63,540,000	
	- Pemeliharaan Elevator Lift [10 UNIT x 12 BLN]	120.0 UB	2,775,000	333,000,000	
	- Pemeliharaan Sewage Treatment Plant Gedung II dan III	1.0 UNIT	150,000,000	150,000,000	
	- Pemeliharaan Hydrant	1.0 PKT	149,000,000	149,000,000	
	- Pemeliharaan APAR	312.0 UNIT	350,000	109,200,000	
	- Pemeliharaan Deep Well [3 UNIT x 12 BLN]	36.0 UB	2,680,000	96,480,000	
	- Pemeliharaan Trafo 630 KVA dan 1600 KVA	6.0 UNIT	8,500,000	51,000,000	
	- Pemeliharaan Kubikel Gedung I, II dan III	8.0 UNIT	8,000,000	64,000,000	
	- Pemeliharaan Alarm Gedung	1.0 PKT	125,000,000	125,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Pompa Air Bersih	10.0 UNIT	8,500,000	85,000,000	
	- Pemeliharaan CCTV	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	
	- Pemeliharaan Treatment Trafo	6.0 UNIT	8,500,000	51,000,000	
	- Pemeliharaan Sound System	6.0 UNIT	8,400,000	50,400,000	
	- Pemeliharaan AC Pompa Chiller	7.0 UNIT	25,000,000	175,000,000	
	- Fumigasi	1.0 PKT	60,000,000	60,000,000	
	- Pemeliharaan Ducting AC Central	3.0 Gd	60,000,000	180,000,000	
	- Pemeliharaan Akses Control	1.0 PKT	30,188,000	30,188,000	
	- Pemeliharaan Vertical Blind	1.0 PKT	153,905,000	153,905,000	
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.088-Jakarta III)			32,400,000	RM
	- Pemeliharaan Biaya Solar Genset	4.0 UNIT	8,100,000	32,400,000	
F	<i>Operasional Perkantoran dan Pimpinan</i>			21,630,407,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.088-Jakarta III)			12,617,012,000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1200.0 OB	300,000	360,000,000	
	- Biaya Makan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara [154 ORG x 12 BLN]	1848.0 OB	53,000	97,944,000	
	- Biaya Snack Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara [154 ORG x 12 BLN]	1848.0 OB	22,000	40,656,000	
	- Biaya Jamuan Makan Tamu [250 TAMU x 12 BLN]	3000.0 TB	53,000	159,000,000	
	- Biaya Jamuan Snack Tamu [250 TAMU x 12 BLN]	3000.0 TB	22,000	66,000,000	
	- Biaya Satpam Non PNS [42 ORG x 13 BLN]	546.0 OB	4,600,000	2,511,600,000	
	- Biaya Koordinator Satpam [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	4,800,000	124,800,000	
	- Biaya Pramubakti [40 ORG x 13 BLN]	520.0 OB	4,600,000	2,392,000,000	
	- Biaya Pengemudi VIP Non PNS [5 ORG x 13 BLN]	65.0 OB	4,900,000	318,500,000	
	- Biaya Pengemudi Non PNS [45 ORG x 13 BLN]	585.0 OB	4,600,000	2,691,000,000	
	- Biaya Koordinator Cleaning Service [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	4,600,000	119,600,000	
	- Biaya Cleaning Service [58 ORG x 13 BLN]	754.0 OB	4,300,000	3,242,200,000	
	- Uang Lembur PPNPN	1700.0 OJ	13,000	22,100,000	
	- Uang Makan Lembur PPNPN	400.0 OH	30,000	12,000,000	
	- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	1.0 PKT	60,000,000	60,000,000	
	- Pakaian Kerja Seragam Satpam Non PNS	44.0 STEL	900,000	39,600,000	
	- Pakaian Kerja Seragam Pramubakti	40.0 STEL	590,000	23,600,000	
	- Pakaian Kerja Seragam Cleaning Service	60.0 STEL	590,000	35,400,000	
	- Pakaian Kerja Seragam Pengemudi	50.0 STEL	590,000	29,500,000	
	- Pakaian Kerja PPPK [162 ORG x 2 STEL]	324.0 STEL	838,000	271,512,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			401,600,000	RM
	- Pengadaan Spanduk/Banner	1.0 PKT	20,000,000	20,000,000	
	- Biaya Jamuan Makan Rapat Biasa [53 ORG x 8 KL x 12 BLN]	5088.0 OK	53,000	269,664,000	
	- Biaya Jamuan Snack Rapat Biasa [53 ORG x 8 KL x 12 BLN]	5088.0 OK	22,000	111,936,000	
521252	<u>Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel</u> (KPPN.088-Jakarta III)			100,000,000	RM
	- Pengadaan ARTK	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,143,595,000	RM
	- Pengadaan ATK, ARTK, Persediaan Kesehatan, Bahan Komputer, dan Cetakan	1.0 PKT	2,143,595,000	2,143,595,000	
521813	<u>Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges</u> (KPPN.088-Jakarta III)			20,000,000	RM
	- Biaya Materai	1.0 PKT	20,000,000	20,000,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			6,257,000,000	RM
	- Biaya Sewa Tenda	4.0 PKT	25,000,000	100,000,000	
	- Biaya Sewa Mesin Fotokopi Digital [25 UNIT x 12 BLN]	300.0 UB	5,130,000	1,539,000,000	
	- Biaya Sewa Kendaraan Unit Eselon II [28 UNIT x 12 BLN]	336.0 UB	13,250,000	4,452,000,000	
	- Biaya Sewa Tanaman Hias	1.0 PKT	166,000,000	166,000,000	
523113	<u>Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			91,200,000	RM
	- Biaya Asuransi Gedung I BKN	12.0 BLN	7,000,000	84,000,000	
	- Biaya Asuransi Gedung CAT	12.0 BLN	600,000	7,200,000	
G	<i>Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor</i>			2,226,170,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,386,170,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	23.0 UNIT	33,650,000	773,950,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon I	7.0 UNIT	40,000,000	280,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	4.0 UNIT	37,110,000	148,440,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	32.0 UNIT	3,640,000	116,480,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Microbus	2.0 UNIT	33,650,000	67,300,000	
523199	<u>Belanja Pemeliharaan Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			840,000,000	RM
	- Biaya BBM Eselon II [28 UNIT x 12 BLN]	336.0 UB	2,500,000	840,000,000	
H	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			9,151,008,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.088-Jakarta III)			8,926,608,000	RM
	- Biaya Listrik	12.0 BLN	743,884,000	8,926,608,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.088-Jakarta III)			104,400,000	RM
	- Biaya Telepon dan WA Blast	12.0 BLN	8,700,000	104,400,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.088-Jakarta III)			120,000,000	RM
	- Biaya Air PAM	12.0 BLN	10,000,000	120,000,000	
I	<i>Koordinasi dan Monitoring Pimpinan ke Instansi Terkait</i>			100,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			100,000,000	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan monitoring ke instansi terkait	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4843.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket		61,428,772,000	

4843.EBB.951	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Sarana Internal	1.0 Unit		6,875,667,000	
052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			6,875,667,000	U
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			824,202,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.088-Jakarta III)			824,202,000	9 RM
	- Pengadaan Meubelair	1.0 PKT	824,202,000	824,202,000	*
B	Pengadaan fasilitas perkantoran UPT Mataram dan Gorontalo			6,051,465,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.088-Jakarta III / Reg. S0880124)			6,051,465,000	SBSN
	- Pengadaan Sarana Pendukung UPT Gorontalo	1.0 PKT	2,287,897,000	2,287,897,000	RK
	- Pengadaan Sarana Pendukung UPT Mataram	1.0 PKT	3,763,568,000	3,763,568,000	RK
4843.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		54,553,105,000	
051	Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan			54,553,105,000	U
A	Gedung/Bangunan			54,553,105,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.088-Jakarta III / Reg. S0880124)			54,553,105,000	SBSN
	> Pembangunan UPT BKN Gorontalo			27,130,896,000	RK
	- Pembangunan UPT BKN Gorontalo	1.0 PKT	25,528,000,000	25,528,000,000	RK
	- Pengawasan Pembangunan UPT BKN Gorontalo	1.0 PKT	1,250,500,000	1,250,500,000	RK
	- Pengelolaan Kegiatan Pembangunan UPT BKN Gorontalo	1.0 PKT	352,396,000	352,396,000	RK
	> Pembangunan UPT BKN Mataram			27,422,209,000	RK
	- Pembangunan UPT BKN Mataram	1.0 PKT	25,625,000,000	25,625,000,000	RK
	- Pengawasan Pembangunan UPT BKN Mataram	1.0 PKT	1,270,000,000	1,270,000,000	RK
	- Pengelolaan Kegiatan Pembangunan UPT BKN Mataram	1.0 PKT	527,209,000	527,209,000	RK
4843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	10.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		250,000,000	

4843.EBD.974	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen		250,000,000	
052	Pelaksanaan			250,000,000	U
A	Rapat Koordinasi Kearsipan di Lingkungan BKN			11,220,000	

BIRO UMUM T.A. 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 107,064,317,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Biaya Makan Rapat [60 ORG x 1 KL] - Biaya Snack Rapat [60 ORG x 2 KL]	60.0 OK 120.0 OK	53,000 22,000	5,820,000 3,180,000 2,640,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	RM SBM
<i>B</i>	<i>Pengembangan Kompetensi SDM</i>			20,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Biaya Pelatihan Pegawai	1.0 PKT	20,000,000	20,000,000	9 *
<i>C</i>	<i>Pembinaan persuratan dan pengawasan kearsipan internal BKN</i>			218,780,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan persuratan di Lingkungan BKN - Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan kearsipan internal BKN	1.0 PKT 1.0 PKT	75,000,000 138,680,000	213,680,000 75,000,000 138,680,000	9 *
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Transport Lokal Kegiatan Dalam Kota (PP)	30.0 OK	170,000	5,100,000 5,100,000	RM
4843.FAB	<u>Sistem Informasi Pemerintahan[Base Line]</u>	1.0 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan		200,000,000	
4843.FAB.002	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Sistem Informasi Internal BKN	1.0 Sistem Informasi		200,000,000	
051	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi			200,000,000	U
<i>A</i>	<i>Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi</i>			200,000,000	
536121	<u>Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III) - Pengembangan Aplikasi RokuOne - Pengembangan Aplikasi E-Verifikasi	1.0 PKT 1.0 PKT	150,000,000 50,000,000	200,000,000 150,000,000 50,000,000	9 *

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Timur, 29 Januari 2024

Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, M.AP

NIP. 196605091986032001

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA 3630 3630.EBA	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			1,613,604,000 1,566,773,000 1,566,773,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
3630.EBA.958 051 A 521211	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Perencanaan dan Persiapan Penyelenggaraan Konten Kehumasan Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III) > Rapat Biasa - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	1.0 Layanan 20.0 OK 20.0 OK		387,045,000 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,060,000 440,000	U RM
B 521211	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III) > Rapat Biasa - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)			1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,060,000 440,000	RM
C 521211	Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Terpadu dan Indeks Kepuasan Masyarakat Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III) > Rapat Biasa - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)			1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,060,000 440,000	RM
D 521211	Penyelenggaraan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Belanja Bahan (KPPN.088-Jakarta III) > Rapat Biasa - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)			1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,060,000 440,000	RM
052 A	Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan (Peliputan, Dokumentasi, Benchmarking Pengelolaan Kehumasan)			371,295,000 89,000,000	U

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			78,800,000	9	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Kehumasan	1.0 PKT	67,300,000	67,300,000		
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Kehumasan	1.0 PKT	11,500,000	11,500,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			10,200,000		RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) (3 ORG x 20 KALI)	60.0 OK	170,000	10,200,000		
<i>B</i>	<i>Penyelenggaraan Konten Kehumasan</i>			3,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000		RM
	> Rapat Biasa			3,000,000		
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 2KALI)	40.0 OK	53,000	2,120,000		
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 2 KALI)	40.0 OK	22,000	880,000		
<i>C</i>	<i>Penyelenggaraan Media Publikasi</i>			21,493,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			14,709,000	9	RM
	- Pengadaan Spanduk/Brosur/leaflet/banner/backdrop/Stiker	1.0 PKT	12,209,000	12,209,000		
	- Pengadaan Spanduk/Brosur/leaflet/banner/backdrop/Stiker	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	*	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			6,784,000		RM
	> Spesifikasi			6,784,000		
	- Canva Layanan Pro (33 x Rp 14.000)	1.0 Tahun	1,240,000	1,240,000		
	- Envanto Market Multiple User (2 User) (33 x Rp 14.000)	12.0 Bulan	462,000	5,544,000		
<i>D</i>	<i>Penyusunan Laporan Tahunan BKN Tahun 2024</i>			18,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			18,000,000		RM
	- Pencetakan Buku Laporan Tahunan	1.0 PKT	18,000,000	18,000,000		
<i>E</i>	<i>Media Handling</i>			75,000,000		
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			75,000,000		RM
	- Belanja Jasa Publikasi Media	1.0 PKT	75,000,000	75,000,000		
<i>F</i>	<i>Penyelenggaraan Kegiatan PTPM (Pengelolaan Pelayanan Terpadu, Pengaduan Masyarakat), IKM, dan Keterbukaan Informasi Publik)</i>			74,050,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			72,010,000	9	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan PTPM dan PPID	1.0 PKT	60,510,000	60,510,000		
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan PTPM dan PPID	1.0 PKT	11,500,000	11,500,000	*	

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,040,000	RM
	- Uang transport kegiatan dalam kota (3 ORG x 4 KALI)	12.0 OK	170,000	2,040,000	
G	<u>Fasilitas Audiensi</u>			25,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			25,500,000	RM
	> Rapat Biasa			25,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 17 KALI)	340.0 OK	53,000	18,020,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 17 KALI)	340.0 OK	22,000	7,480,000	
H	<u>Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik</u>			10,400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			10,400,000	RM
	- Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 ORG x 2 JAM x 2 KALI)	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
	- Narasumber/Praktisi/Profesional (1 ORG x 2 JAM x 2 KALI)	4.0 OJ	1,700,000	6,800,000	
I	<u>Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik</u>			4,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,500,000	RM
	> Rapat Biasa			4,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 3 KALI)	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 3 KALI)	60.0 OK	22,000	1,320,000	
J	<u>Rapat Koordinasi Kehumasan Tahun 2024</u>			50,352,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			43,552,000	RM
	- Seminar Kit	1.0 PKT	26,500,000	26,500,000	
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT (106 ORG X 2 KALI)	212.0 Paket	50,000	10,600,000	
	- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT (106 ORG X 2 KALI)	212.0 Paket	21,000	4,452,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			6,800,000	RM
	- Honor Narasumber Profesional (2 ORG x 2 JAM x 1 KEG)	4.0 OJ	1,700,000	6,800,000	
053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan			9,750,000	U
A	<u>Penyelenggaraan Konten Kehumasan</u>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,500,000	RM
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
B	<u>Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Terpadu dan</u>			1,500,000	

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>				
	<u>Belanja Bahan</u>			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
C	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
D	<i>Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik</i>			3,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			3,750,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			3,750,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (50 ORG X 1 KALI)	50.0 OK	53,000	2,650,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (50 ORG X 1 KALI)	50.0 OK	22,000	1,100,000	
E	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID)</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
3630.EBA.959	Layanan Protokoler	1.0 Layanan		1,179,728,000	
051	Perencanaan dan Persiapan			35,500,000	U
A	<i>Perencanaan dan Persiapan Kerja Sama Dalam Negeri</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
B	<i>Perencanaan dan Persiapan Kerja Sama Luar Negeri</i>			1,500,000	

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,500,000	RM
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
C	<i>Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan</i>			22,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			22,000,000	9 RM
	- Penggandaan	1.0 PKT	12,000,000	12,000,000	
	- Penggandaan	1.0 PKT	5,500,000	5,500,000	*
	>> Rapat Biasa		0	4,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (15 ORG X 4 KALI)	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (15 ORG X 4 KALI)	60.0 OK	22,000	1,320,000	
D	<i>Persiapan Keprotokolan</i>			4,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,500,000	RM
	> Rapat Biasa			4,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 3 KALI)	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 3 KALI)	60.0 OK	22,000	1,320,000	
E	<i>Perencanaan Tata Usaha</i>			6,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			6,000,000	RM
	> Rapat Biasa			6,000,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (50 ORG X 1 KALI)	50.0 OK	53,000	2,650,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (50 ORG X 1 KALI)	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (15 ORG X 2 KALI)	30.0 OK	53,000	1,590,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (15 ORG X 2 KALI)	30.0 OK	22,000	660,000	
052	Pelaksanaan			1,129,978,000	U
A	<i>Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri</i>			204,206,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,500,000	RM
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			201,006,000	9	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dalam negeri	1.0 PKT	44,780,000	44,780,000		
	- Perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dalam negeri	1.0 PKT	146,206,000	146,206,000		
	- Perjalanan dinas dalam rangka kerjasama luar negeri	1.0 PKT	10,020,000	10,020,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,700,000		RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kota	1.0 PKT	1,700,000	1,700,000		
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri</i>			223,801,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,500,000		RM
	> Rapat Biasa			1,500,000		
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000		
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			51,800,000	9	RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka kerjasama luar negeri di dalam negeri	1.0 PKT	38,800,000	38,800,000		
	- Perjalanan dinas dalam rangka kerjasama luar negeri di dalam negeri	1.0 PKT	13,000,000	13,000,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,700,000		RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kota	1.0 PKT	1,700,000	1,700,000		
524211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</u> (KPPN.088-Jakarta III)			168,801,000		RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka kerjasama luar negeri	1.0 PKT	168,801,000	168,801,000		
<i>C</i>	<i>Rapat Tata Usaha</i>			2,250,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			2,250,000		RM
	> Rapat Biasa			2,250,000		
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (15 ORG x 2 KALI)	30.0 OK	53,000	1,590,000		
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (15 ORG x 2 KALI)	30.0 OK	22,000	660,000		
<i>D</i>	<i>Rapat Keprotokolan</i>			3,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000		RM
	> Rapat Biasa			3,000,000		
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 2 KALI)	40.0 OK	53,000	2,120,000		
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 2 KALI)	40.0 OK	22,000	880,000		
<i>E</i>	<i>Rapat Koordinasi Kesekretarian (Di Luar Kantor)</i>			86,950,000		

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : Z

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			15,650,000	RM
	- Seminar Kit	1.0 PKT	13,750,000	13,750,000	
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Backdrop	1.0 PKT	400,000	400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,500,000	RM
	- Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) (1 Org x 2 Jam)	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) (1 Org x 2 Jam)	2.0 OJ	900,000	1,800,000	
	- Moderator (1 ORG X 1 KEG)	1.0 OK	700,000	700,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			66,800,000	RM
	- Uang Harian Fullday di dalam kota (100 ORG x 1HR x 1 KL)	100.0 OH	130,000	13,000,000	
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday Di Luar Kantor -Pejabat eselon III kebawah (100 ORG x 1 PKT x 1 KL)	100.0 OP	433,000	43,300,000	
	- Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota (70 ORG x 1 KL)	70.0 OK	150,000	10,500,000	
F	<i>Pelaksanaan Tata Usaha dan Keprotokolan</i>			328,402,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.088-Jakarta III)			10,000,000	RM
	- Pembuatan Kartu Pass Bandara	4.0 OK	2,500,000	10,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.088-Jakarta III)			20,000,000	RM
	- Pembuatan Plakat	1.0 PKT	20,000,000	20,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			276,982,000	9 RM
	- Perjalanan dinas dalam rangka tata usaha dan keprotokolan	1.0 PKT	264,482,000	264,482,000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka tata usaha dan keprotokolan	1.0 PKT	12,500,000	12,500,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.088-Jakarta III)			21,420,000	RM
	- Uang Transport Kegiatan Dalam kota (3 Orang x 42 KL)	126.0 OK	170,000	21,420,000	
G	<i>Pelaksanaan Pimpinan</i>			281,369,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.088-Jakarta III)			281,369,000	9 RM
	- Perjalanan Dinas Pimpinan	1.0 PKT	231,369,000	231,369,000	
	- Perjalanan Dinas Pimpinan	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	*
053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan			14,250,000	U
A	<i>Sosialisasi/ Evaluasi/Pelaporan Kerja Sama Dalam Negeri</i>			1,500,000	

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,500,000	RM
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
<i>B</i>	<i>Sosialisasi/ Evaluasi/Pelaporan Kerja Sama Luar Negeri</i>			4,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			4,500,000	RM
	> Rapat Biasa			4,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (30 ORG X 2 KALI)	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (30 ORG X 2 KALI)	60.0 OK	22,000	1,320,000	
<i>C</i>	<i>Rapat Evaluasi Tata Usaha</i>			5,250,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			5,250,000	RM
	> Rapat Biasa			5,250,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (30 ORG x 1 KALI)	30.0 OK	53,000	1,590,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (30 ORG x 1 KALI)	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 2 KALI)	40.0 OK	53,000	2,120,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 2 KALI)	40.0 OK	22,000	880,000	
<i>D</i>	<i>Rapat Evaluasi Keprotokolan</i>			3,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			3,000,000	RM
	> Rapat Biasa			3,000,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 2 KALI)	40.0 OK	53,000	2,120,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG x 2 KALI)	40.0 OK	22,000	880,000	
4844	<u>Legislasi dan Litigasi</u>			46,831,000	
4844.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	25.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		46,831,000	

4844.EBA.957	Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Hukum	1.0 Layanan		46,831,000	
051	Perencanaan dan Persiapan			1,500,000	U
<i>A</i>	<i>Perencanaan dan Persiapan Layanan Hukum</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.088-Jakarta III)			1,500,000	RM
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA TA 2024

KEMEN/LEMB (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNIT ORG (01) Badan Kepegawaian Negara
UNIT KERJA (017220) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
ALOKASI Rp. 1,613,604,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pelaksanaan			43,831,000	U
A	<i>Pelaksanaan Layanan Hukum</i>			43,831,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			42,331,000	9 RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan hukum	1.0 PKT	37,831,000	37,831,000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan hukum	1.0 PKT	4,500,000	4,500,000	*
053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan			1,500,000	U
A	<i>Sosialisasi/ Evaluasi/Pelaporan Layanan Hukum</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Rapat Biasa			1,500,000	
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (20 ORG X 1 KALI)	20.0 OK	22,000	440,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta Timur, 15 Februari 2024

Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, M.AP

NIP. 196605091986032001